

**UPAYA PEMERINTAH DAERAH DALAM MENCAPAI
OPINI WTP PADA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SIDRAP**

SKRIPSI

**OLEH
JUMARIAH
105730467414**



**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2018**

**UPAYA PEMERINTAH DAERAH DALAM MENCAPAI
WTP PADA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SIDRAP**

JUMARIAH

NIM 105730467414

Diajukan Guna Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi (S1) Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2018**

MOTTO

“Sebai-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya ”. (H.R) Thabrani & Darutnhi)

“Mereka yang berenti belajar, akan menjadi pemilik masa lalu. Dan mereka yang masih terus belajar, akan menjadi pemilik masa depan.”

“Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah. (Thomas Alva Edison)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

- Allah SWT. atas rahmat yang diberikan
- Ke 2 Orang Tua yang telah membesarkan dan mendidiku dengan penuh kasih sayang, terimah kasih atas pengorbanan, nasehat dan do'a yang tiada hentinya yang kalian berikan kepadaku selama ini.
- Kakak tercinta yang senantiasa dalam memberikan dukungan serta do'a kalian semoga Allah membalas kebaikan kalian.
- Teman-teman terkasihku Widyana², teman-teman ak.2/14



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Alamat: Jl. Sultan Alauddin No.259 Telp. (0411) 860 132 Makassar 90221

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Penelitian : "Upaya Pemerintah Daerah dalam Mencapai Opini WTP
pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sidrap"

Nama : JUMARIAH

Nim : 105730467414

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa skripsi ini telah diperiksa dan di ujikan didepan Panitia
Penguji Skripsi Strata Satu (S1) pada tanggal 31 Agustus 2018 pada Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar

Makassar, 31 Agustus 2018

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

13/8-18

Dr. H. Andi Rustam, SE, MM, Ak. CA, CPA
NIDN: 0909096703

Ismail Raulong, SE, MM
NIDN: 0905107302

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi

Ketua Jurusan Akuntansi

Ismail Rasulong, SE, MM
NBM: 903078

Ismail Badollahi, SE, M.Si, Ak. CA, CSP
NBM: 1073428



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Alamat: Jl. Sultan Alauddin No.259 Telp. (0411) 860 132 Makassar 90221

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas Nama JUMARIAH, NIM 105730467414, diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 0009/2018 M, tanggal 19 Dzulhijjah 1439 H/31, Agustus 2018 M, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi** pada program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

19 Dzulhijjah 1439 H
Makassar, _____
31 Agustus 2018 M

PANITIA UJIAN

1. Pengawas : Dr. H. Abd. Rahman Rahim, SE., MM
(Rektor Unismuh Makassar) _____
2. Ketua : Ismail Rasulong, SE., MM
(Dekan Fak. Ekonomi dan Bisnis) _____
3. Sekretaris : Dr. Agussalim HR, SE., MM
(WD 1 Fak. Ekonomi dan Bisnis) _____
4. Penguji : 1. Dr. Agussalim HR, SE., MM
2. Ismail Badollahi, SE, M.Si. Ak. CA, CS
3. Dr. H. Andi Rustam, SE, MM. Ak. CA. CPA
4. Faidul Adzhim., SE., M.Si

Disahkan Oleh,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar

Ismail Rasulong, SE, MM
NBM : 903078



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Alamat: Jl. Sultan Alauddin No.259 Telp. (0411) 860 132 Makassar 90221

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : JUMARIAH
Stambuk : 105730467414
Program Studi : Akuntansi
Dengan Judul : "Upaya Pemerintah Daerah dalam Mencapai Opini WTP
pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sidrap"

Dengan ini menyatakan bahwa:

Skripsi yang saya ajukan di depan Tim Penguji adalah ASLI hasil karya sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapa pun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

22 Dzulhijjah 1439H

Makassar, _____

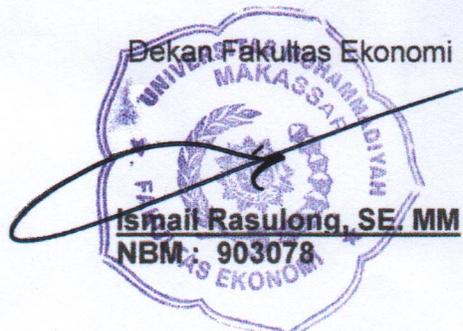
3 September 2018 M

Yang Membuat Pernyataan.



Diketahui Oleh:

Dekan Fakultas Ekonomi



Ketua Jurusan Akuntansi

Ismail Badollahi, SE, M.Si, Ak, CA, CSP
NBM: 1073428

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena limpahan Rahmat dan Karunia-Nya skripsi yang berjudul **“Upaya Pemerintah Daerah Dalam Mencapai Opini WTP pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sidrap”** dapat diselesaikan. Pelaksanaan penelitian skripsi ini sedikit mengalami kesulitan dan hambatan, namun berkat kerja keras penulis dan adanya bimbingan dan bantuan dari beberapa pihak akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Penulis sadar bahwa skripsi ini dapat terselesaikan seperti sekarang ini karena berkat bantuan dari orang-orang yang selama ini telah membantu, mendukung dan membimbing penulis. Untuk itu penulis tak lupa menyampaikan terimah kasih kepada :

1. Dr. H. Abd Rahman Rahim, SE.,MM selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Ismail Rasulong, SE. MM selaku Dekan beserta seluruh Staff Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
3. Bapak Ismail Badollahi, SE.,M.Si,Ak.Ca selaku Ketua Jurusan beserta seluruh Dosen Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak Dr.H.Andi Rustam,SE,MM.AK.CA.CPA dan Bapak Ismail Rasulong, SE.MM selaku Dosen pembimbing I dan Pembimbing II yang telah banyak membantu penulis melalui saran dan kritik yang diberikan demi kesempurnaan skripsi ini.

5. Seluruh Dosen dan Staf Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar.
6. Kedua orang tuaku,serta saudara-saudaraku penulis ucapkan banyak terima kasih untuk semua bimbingannya, nasehatnya dan dukungannya hingga penulis bisa jadi seperti sekarang,.
7. Pimpinan serta pegawai Instansi Badan Pengelolah Keuangan Daerah (BPKD) yang telah memberi izin meneliti sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dengan baik.
8. Buat teman-teman akuntansi 2 angkatan 2014 yang telah banyak membantu selama perkuliahan.

Akhirnya, penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir ini masih jauh dari unsur kesempurnaan, masih banyak terdapat kekeliruan dan kekurangan yang disebabkan oleh keterbatasan ilmu maupun minimnya pengalaman penulis miliki. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapakan kritikan dan saran yang bersifat membangun guna kesempurnaan tugas akhir ini.

Semoga segala bentuk bantuan yang penulis terima dan berbagai pihak dibalas oleh Allah SWT dan semoga tugas akhir ini dinilai ibadah di sisi-Nya dan bermanfaat bagi siapa saja yang membutuhkannya, khususnya pada lingkungan Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Akhirnya, semoga segenap aktivitas yang kita lakukan mendapat bimbingan dan Ridho dari-Nya. Amin.

Makassar, 25 November 2017


Penulis

ABSTRAK

JUMARIAH, TAHUN 2018 *Upaya Pemerintah Daerah dalam Mencapai Opini WTP pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sidrap.* Skripsi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Pembimbing I Andi Rustam dan Pembimbing II Ismail Rasulong.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya-upaya pemerintah daerah dalam mencapai opini WTP. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Kualitatif. Data diperoleh dari hasil wawancara dengan beberapa responden untuk memperoleh informasi terkait dengan objek yang diteliti,

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah Kabupaten Sidrap agar dapat meningkatkan kompetensi sumber daya manusianya sehingga dapat melaksanakan perannya sebagai penjamin mutu (quality assurance) dan pemberi masukan (consulting assurance).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat perdidat laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten sidrap mengalami peningkatan dan upaya yang dilakukan pemerintah daerah kabupaten sidrap berpengaruh signifikan baik sebelum mendapat opini WTP maupun sesudah mendapat opini WTP karena laporan keuangan menjadi salah satu tolak ukur diberikannya opini oleh BPK RI.

Kata kunci: Opini dan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

ABSTRACT

JUMARIAH, the year 2018 Effort local governments in reaching Opinions on local Government District WTP Srikalahasthi. Theses Courses in accounting and Business Economics University of Muhammadiyah Makassar. Guided by Counselors and tutors to Rustam Andi I II Ismail Rasulong.

This research aims to know the efforts local governments in reaching opinion WTP. This research uses Qualitative research methods. Data obtained from interviews with some respondents to obtain information related to objects that are researched,

This research is expected to be the input for the Government District Srikalahasthi competency in order to increase its human resources so that it can carry out its role as the guarantor of quality (quality assurance) and the feedback (consulting assurance).

The results of this research show that the level of the local government finance report perdikat County srikalahasthi experience increased and efforts made the local government districts of influential srikalahasthi significantly well before got opinions both WTP having received the opinion of WTP because the financial statements be one benchmark exerts opinion BPK RI.

Keywords: *Opinion and Fair Without Exception (WTP)*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN PERNYATAAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK BAHASA INDONESIA.....	x
ABSTRACT.....	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Keuangan Daerah	6
B. Pemeriksaan Keuangan Daerah.....	9
C. Standar Akuntansi Pemerintah	17

D. Audit.....	18
E. Opini Audit.....	20
F. Standarisasi Opini Wajar Tanpa Pengecualian	22
G. Upaya Pemerintah dalam Meraih Opini WTP.....	24
H. Tujuan Empiris	26
I. Kerangka Pikir	30
BAB III METODE PENELITIAN	32
A. Jenis dan sumber data	32
B. Pocus Penelitian Penelitian	32
C. Lokasi Waktu Penelitian	32
D. Sumber Data.....	33
E. Pengumpulan Data	34
F. Instrumen Penelitian	35
G. Teknis Analisis Data	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37
A. Gambaran Umum dan Hasil penelitian.....	37
B. Informan Penelitian	45
C. Hasil Penelitian	46
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	60
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Nomor	Judul	Halaman
Tabel 2.1	PenelitianTerdahulu	28
Tabel 4.3	Tabel Kriteria Penilaian untuk Mendapat Opini WTP	47
Tabel 4.4	Opini BPK-RI	48

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Judul	Halaman
Gambar 2.1	Hubungan Audit	19
Gambar 2.2	Kerangka Konseptual	31
Gambar 4.1	Struktur Organisasi	41

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di era globalisasi sekarang ini mewujudkan pemerintahan yang baik menjadi suatu hal yang tidak bisa ditawar lagi keberadaannya dan mutlak terpenuhi. Prinsip pemerintahan yang baik meliputi akuntabilitas yang diartikan sebagai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya, keterbukaan dan transparansi dalam arti masyarakat tidak hanya dapat mengakses suatu kebijakan tetapi juga ikut berperan dalam proses perumusannya dan ketaatan pada hukum dalam arti seluruh kegiatan didasarkan pada aturan hukum yang berlaku secara adil dan konsisten serta partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan umum dan pembangunan.

Pada sektor publik di Indonesia terjadi fenomena atas perolehan opini audit wajar tanpa pengecualian (WTP) dari badan pemeriksa keuangan daerah (BPK RI) atas pemeriksaan laporan keuangan baik pusat maupun pemerintahan. Khususnya pada pemerintah daerah kepala daerah seakan terobsesi dan saling berlomba-lomba untuk mendapatkan gelar opini WTP di laporan yang dihasilkan. Pada sektor publik di Indonesia opini tersebut diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada laporan keuangan kementerian atau lembaga dan laporan keuangan pemerintah daerah yang telah di periksa dan telah tersaji secara wajar. Penyelenggaraan pemerintah pertanggung jawaban atas pengelolaan keuangan di cerminkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang saatnya akan di audit oleh BPK dan diberikan opini. Salah satu bentuk opini hasil audit BPK atas LKPD Sidrap dapat berupa "WTP". Opini tersebut merupakan impian

seluruh institusi baik pusat maupun daerah, sebab dengan opini tersebut institusi yang bersangkutan akan mendapat akuntabilitas yang baik sebagai entitas kepada para publik atau masyarakat. Dengan memperoleh opini WTP, tingkat kepercayaan atas laporan keuangan pemda akan semakin meningkat, manfaat lainnya laporan keuangan tersebut dapat dijadikan instrument untuk membuat keputusan.

Propinsi Sulawesi selatan merupakan salah satu daerah yang mendapat predikat opini WTP dari BPK RI pada tahun 2017. Dari 25 entitas yang ada, 11 Kabupaten/Kota yang mendapatkan opini WTP, Meraih WTP bukan berarti daerah tersebut bebas dari penyimpangan. Untuk 14 entitas lainnya dapat dikatakan kualitas laporannya masih rendah.

Kabupaten Sidrap menjadi salah satu daerah di Sulawesi selatan yang menerima opini WTP BPK RI pada tahun 2017 lalu, pencapaian ini tentunya menjadi kebanggaan tersendiri bagi pemerintah kabupaten Sidrap walaupun tidak menjamin kesejahteraan. Namun kabupaten sidrap menjadi contoh, karena dapat meraih predikat tersebut, serta memiliki penghasilan tinggi dengan angka kemiskinan rendah.

Dari proses ini diharapkan bahwa pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah mencapai titik ideal yang berujung pada tercapainya kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pelayanan publik, dan meningkatkan daya saing daerah dapat di capai, penyelenggaraan keuangan daerah sebagian besar mempunyai permasalahan khusus yaitu belum diperolehnya kondisi optimal penyajian keuangan yang akuntabel, bebas salah saji yang materil, dan patuh terhadap

ketentuan yang berlaku. Hal ini terlihat jelas dari minimnya WTP yang dapat disajikan BPK kepada PEMDA dari tahun 2007 sampai 2017.

Sesuai dengan Peraturan Permendagri No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan berbasis akrual terdiri atas : (1) Laporan Realisasi Anggaran atau LRA (2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (3) Laporan Oprasional (4) Laporan Perubahan Ekuitas (5) Neraca (6) Laporan Arus Kas (7) Catatan Atas Laporan Keuangan.

Berlakunya peraturan tersebut menuntut pemerintah daerah mau tidak mau harus mematuhi yanglain tentang keharusan dalam penyelenggaraan daerah akuntansi keuangan daerah berbasis akrual. Pelaksanaan akuntansi keuangan daerah tersebut di perlukan keahlian khusus di bidang akuntansi yng ditunjang dengan program aplikasi computer yang handal serta di ikuti dengan peraturan perundang-undangan di tingkat daerah yang kemungkinan akan lebih menghambat dalam memperoleh opini WTP karena di perlukan sumber daya yang memahami akuntansi berbasis akrual.

Berdasarkan pada uraian-uraian tersebut, sehingga peneliti sangat tertarik untuk mengangkat “Upaya Pemerintah Daerah Dalam Mencapai Opini WTP Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sidrap untuk meneliti lebih mendalam terkait dengan upaya-upaya apa yang dilakukan pemerintah kabupaten sidrap dan bagaimana tingkat predikat laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten sidrap dalam mencapai predikat opini WTP.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat dirumuskan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana tingkat predikat Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidrap ?
2. Upaya apa yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidrap untuk Mencapai Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui tingkat predikat Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidrap.
2. Untuk mengetahui dan memahami upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Sidrap untuk mencapai Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) .

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu untuk digunakan sebagai penunjang bagi peneliti lainnya yang tertarik dalam bidang Upaya Pemerintah Daerah dalam Mencapai WTP Pada Pemerintah Daerah.

2. Manfaat Praktis

Sebagai masukan bagi Pemerintah Daerah dalam menyajikan laporan keuangan negara agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Keuangan Daerah

1. Pengertian Keuangan Daerah

Secara teoritis keuangan daerah dapat diartikan sebagai semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang atau segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki dan atau dikuasai daerah atau negara lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan perundang-undangan . PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 1 ayat (5) menegaskan, bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya semua bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam rangka Anggaran Besar Pendapatan dan Belanja Daerah (Karianga, 2017: 54).

Keuangan daerah meliputi semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang. Termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Pemerintah daerah adalah pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota. Pemerintah daerah merupakan bagian perpanjangan pemerintah (pusat), sehingga keuangan daerah merupakan bagian tak terpisahkan dari keuangan negara.” (Rahim, 2015:44)

2. Ruang Lingkup Keuangan Daerah

Ruang lingkup daerah meliputi hak daerah, kewajiban daerah, penerimaan daerah, pengeluaran daerah, kekayaan daerah, dan kekayaan pihak lain yang dikuasai Daerah.

Secara rinci menurut Rahim, 2015: 44-45) ruang lingkup daerah meliputi hal-hal berikut:

- a. Hak daerah, untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan tunjangan.
- b. Kewajiban daerah, untuk menyelenggarakan urusan pemerintah daerah dan membayar tagihan pihak ke tiga.
- c. Penerimaan daerah, adalah keseluruhan uang yang masuk ke kas daerah. Pengertian ini harus dibedakan dengan pengertian pendapatan daerah, karena tidak semua penerimaan merupakan pendapatan daerah. Pendapatan daerah merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
- d. Pengeluaran daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah. Sering kali istilah pengeluaran daerah tertukar dengan belanja daerah. Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
- e. Kekayaan daerah, yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah.
- f. Kekayaan pihak lain yang dikuasi pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintah daerah dan/atau kepentingan

umum. Undang-undang keuangan negara menjelaskan bahwa yang dimaksud pihak lain adalah meliputi kekayaan yang dikelola oleh orang atau badan lain berdasarkan kebijakan pemerintah, yayasan-yayasan dilingkungan kementerian negara/lembaga, atau perusahaan negara/daerah.

3. Pengelolaan Keuangan Daerah

a. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah

Kepala Daerah adalah Pemegang Kekuasaan umum Pengelolaan Keuangan Daerah. Keuangan umum pengelolaan Keuangan Daerah itu meliputi antara lain fungsi perencanaan umum, fungsi penyusunan anggaran. fungsi pemungutan pendapatan, fungsi perbendaharaan umum Daerah, fungsi penggunaan anggaran , serta fungsi pengawsan dan pertanggungjawabkan.

Selaku pejabat pemegang kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah. Kepala Daerah mendelegasikan sebagian atau seluruh kewenangannya kepada sekertaris Daerah atau Perangkat Pengelolah Keuangan Daerah. Kepala Daerah menetapkan terlebih dahulu para Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dengan surat keputusan untuk dapat melaksanakan anggaran.

b. Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatuhan.

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) merupakan dasar pengelolaan Keuangan Daerah dalam tahun anggaran tertentu. Ketentuan ini berarti bahwa APBD merupakan rencana pelaksanaan semua pendapatan daerah dan semua belanja daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dalam tahun anggaran tertentu. Dengan demikian, pemungutan semua penerimaan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi bertujuan untuk memenuhi target yang ditetapkan dalam APBD. Semua Pengeluaran daerah dan ikatan yang membebani Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dilakukan sesuai jumlah dan sasaran yang ditetapkan dalam APBD. (Bratakusumah dan Dadang, 2004:208-209)

B. Pemeriksaan Keuangan Daerah

1. Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pemeriksaan keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemeriksaan keuangan ini dilakukan oleh BPK RI dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah. Dalam peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2007 Paragraf 14 menyatakan pemeriksaan keuangan tersebut bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai (reasonable assurance) apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Pemeriksanaan atas laporan keuangan yang meliputi:

a. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan pemerintah daerah dalam suatu periode tertentu. Laporan realisasi anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. Dalam laporan realisasi anggaran harus diidentifikasi secara jelas, dan di ulang pada setiap halaman laporan.

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan SAL merupakan salah satu komponen laporan keuangan yang disyaratkan oleh standar akuntansi pemerintah berbasis akrual sebagaimana diatur dalam PP No 71 tahun 2010. Sebelumnya standar akuntansi pemerintahan berbasis kas menuju akrual (PP Nomor 24 Tahun 2005) tidak mensyaratkan laporan SAL disajikan oleh entitas pemerintahan.

Laporan perubahan saldo anggaran lebih (LP-SAL) menyajikan saldo anggaran lebih awal (saldo tahun sebelumnya), penggunaan saldo anggaran lebih, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA) tahun berjalan, koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya, lain-lain dan Saldo anggaran lebih akhir untuk periode berjalan.

LP-SAL dimaksudkan untuk memberikan ringkasan atas pemanfaatan saldo anggaran dan pembiayaan pemerintah, sehingga suatu entitas pelaporan harus menyajikan rincian lebih

lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam LP-SAL dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Struktur LP-SAL baik pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota tidak memiliki perbedaan.

c. Laporan Operasional

Laporan operasional (LO) juga merupakan laporan keuangan yang sekarang wajib disusun dan disajikan oleh pemda sebagai amanat PP 71 Tahun 2010. Sebelumnya PP 24 Tahun 2005 belum mensyaratkan LO sebagai komponen laporan keuangan pokok pemda. Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

d. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas juga merupakan komponen laporan keuangan yang diamanatkan oleh PP 71 tahun 2010 dan pemendagri Nomor 64 tahun 2013 yang wajib disusun pada tingkat SKPD, PPKD, dan Pemda. Dengan demikian LPE wajib disusun dan disajikan baik oleh entitas akuntansi maupun entitas pelaporan. Dalam penyusunan LPE, fungsi akuntansi harus menyusun Laporan Operasional terlebih dahulu. Hal ini karena dalam LPE terdapat akun surplus/defisit yang dapat diperoleh jika laporan operasional sudah selesai.

Laporan perubahan ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos Ekuitas awal atau ekuitas tahun sebelumnya, Surplus/deficit pada periode bersangkutan dan koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar.

e. Neraca

Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi tentang posisi keuangan pemerintah daerah yaitu asset, utang, dan ekuitas dana pada suatu tanggal tertentu. Neraca merupakan laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang posisi keuangan sebuah organisasi pada suatu saat tertentu. (Samryn, 2014:33)

Pada dasarnya kegunaan neraca adalah untuk meramalkan kesehatan keuangan, neraca dapat digunakan untuk menganalisis likuiditas, solvensi, fleksibilitas keuangan. Selain itu, neraca juga dapat meramalkan jumlah, waktu, dan ketiidakpastian arus kas di masa depan.

f. Laporan Arus Kas

Arus kas merupakan suatu laporan yang menyediakan informasi mengenai penerimaan kas dan pengeluaran kas oleh suatu entitas selama periode tertentu.

Adapun beberapa tujuan laporan arus kas yaitu:

1. Menyediakan informasi yang relevan mengenai penerimaan dan pengeluaran kas bagi investor dan kreditur.

2. Membantu membaca laporan keuangan dalam memperkirakan perbedaan antara lama bersih (new income) dengan penerimaan serta pengeluaran kas yang terkait dengan pendapatan tersebut.
 3. Membantu menentukan pengaruh transaksi kas dan non kas dari aktivitas pendanaan dan investasi terhadap posisi keuangan suatu entitas.
- g. Catatan atas laporan keuangan

Catatan atas laporan keuangan merupakan salah satu dari komponen laporan keuangan Pemda. Catatan atas laporan keuangan ini merupakan bentuk laporan keuangan yang paling tidak terstruktur, namun harus disajikan secara baik, terutama pada penjelasan per pos laporan keuangan harus sesuai dengan tata urusan pos-pos tersebut dalam menyajikan laporan keuangan.

Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan realisasi anggaran, neraca, dan laporan arus kas.

2. Pemeriksaan Atas Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah

Pengukuran kinerja keuangan merupakan suatu usaha yang formal untuk mengevaluasi efisiensi dan efektivitas perusahaan dalam menghasilkan laba dan posisi kas tertentu. Dengan pengukuran kinerja keuangan ini dapat dilihat prospek pertumbuhan dan perkembangan keuangan perusahaan dari mengandalkan sumber daya yang

dimilikinya. Perusahaan dikatakan berhasil apabila perusahaan telah mencapai suatu kinerja tertentu yang telah di terapkan .

Pengukuran kinerja keuangan adalah penting sebagai sarana atau indikator dalam rangka memperbaiki kegiatan operasional perusahaan. Dengan perbaikan kinerja operasional di harapkan bahwa perusahaan dapat mengalami pertumbuhan keuangan yang lebih baik dan juga dapat bersaing dengan perusahaan lain lewat efisiensi dan efektivitas. (Hery, 2016:25)

Pemeriksaan kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah adalah pemeriksaan atas aspek ekonomi dan efisiensi, serta pemeriksaan atas aspek efektivitas yang lazim dilakukan bagi kepentingan manajemen oleh aparat pengawasan intern pemerintah daerah. Di dalam Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara Paragraf 16 menjelaskan pemeriksaan kinerja terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi. Pemeriksaan kinerja menghasilkan informasi yang berguna meningkatkan kinerja suatu program dan memudahkan pengambilan keputusan bagi pihak yang bertanggung jawab untuk mengawasi dan melakukan tindakan koreksi serta meningkatkan pertanggung jawaban publik. Pemeriksaan kinerja menghasilkan temuan, simpulan dan rekomendasi.

Beberapa faktor yang mengantar Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan mendapat Opini WTP atas hasil pemeriksaan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD oleh BPK-RI, yaitu adanya komitmen dan aksi kongkrit Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk

terus meningkatkan kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang meliputi:

1) Regulasi

- a. Penerbitan Regulasi Keuangan Daerah secara masif sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta perubahannya.
- b. Adanya konsistensi implementasi regulasi dimaksud pada SKPD selaku entitas akuntansi yang kemudian berdampak pada meningkatnya ketaatan terhadap peraturan perundangundangan yang berlaku.
- c. Adanya konsistensi penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang memadai dalam penyusunan Laporan Keuangan Daerah.
- d. Mensosialisasikan perubahan regulasi secara intens dan continue kepada setiap SKPD.

2) Manajemen

- a. Ketetapan penetapan APBD sesuai jadwal yang telah ditetapkan dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- b. Meningkatnya kualitas penatausahaan keuangan daerah.
- c. Penerapan pelayanan prima dalam proses pencairan dana.
- d. Mensinkronkan antara produk regulasi dengan penyempurnaan system Akuntansi Keuangan Daerah, sehingga dapat mendorong

peningkatan mutu pengelolaan dan penyusunan pertanggungjawaban LKPD.

- e. Meningkatkan kapasitas penyusunan Laporan Keuangan SKPD oleh SKPD sebagai entitas akuntansi.
- f. Meningkatkan kapasitas penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan oleh BPKD sebagai entitas akuntansi dan entitas pelaporan.

3) Sumber Daya Manusia

- a. Terus berupaya meningkatkan kualitas SDM secara konsisten melalui kerjasama dengan lembaga-lembaga perguruan tinggi dalam bentuk pendidikan, pelatihan, bimbingan teknis, workshop, seminar dan rapat-rapat.
- b. Adanya motivasi yang kuat dari segenap unsur aparat pengelola keuangan Pemerintah Provinsi untuk terus bekerja lebih baik.
- c. Meningkatkan peran auditor intern (Inspektorat Provinsi) untuk mereview dan mensupervisi penyusunan dan penyajian laporan keuangan di SKPD dan di BPKD selaku SKPKD.
- d. Mengaktifkan peran Tim Tingkat Lanjut Pemerintah Provinsi dalam penanganan tindak lanjut LHP BPK-RI.

4) Anggaran

- a. Adanya ketersediaan anggaran yang relatif cukup memadai untuk mendukung peningkatan output dari setiap kegiatan.
- b. Menyediakan anggaran yang cukup untuk pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) dalam rangka peningkatan kapasitas dan kinerja pengelola

c. keuangan yang makin baik.

C. Standar Akuntansi Pemerintah

Akuntansi pemerintah diartikan sebagai aktivitas pemberian jasa untuk menyediakan informasi keuangan pemerintah kepada para pengguna berdasarkan proses pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi keuangan pemerintah serta penafsiran atas informasi tersebut. (Arif, et.al., 2009: 11). Berdasarkan pasal 1 ayat 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan (SAP), SAP berbasis akrual adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

Menurut Wijaya, (2008): 313, SAP merupakan standar akuntansi pertama diindonesia yang mengatur mengenai akuntansi pemerintahan Indonesia. Dengan adanya standar ini, laporan keuangan pemerintah yang merupakan hasil dari proses akuntansi diharapkan dapat digunakan sebagai alat komunikasi antara pemerintah dengan *stakeholders* sehingga tercapai pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan satu Paragraf 16:

Laporan keuangan menyajikan secara wajar posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas suatu entitas. Penyajian yang wajar menyaratkan penyajian secara jujur dampak dari transaksi, peristiwa lain, dan kondisi sesuai dengan definisi dan kriteria pengakuan asset, liabilitas, pendapatan dan beban yang diatur dalam kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Penerapan SAK, dengan pengungkapan jika

diperlukan , dianggap menghasilkan menghasilkan penyajian laporan secara wajar.

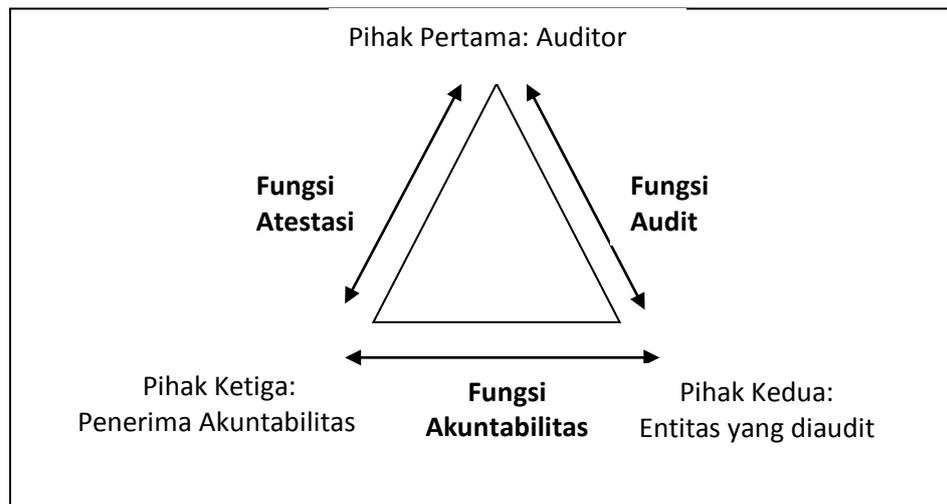
D. Audit

1. Pengertian Audit

Audit merupakan pengumpulan dan pemeriksaan bukti terkait informasi untuk menentukan dan membuat laporan mengenai tingkat kesesuaian antara informasi dan kriteria yang ditetapkan.

Konrath dalam Sukrisno (2011:2) mendefinisikan audit sebagai suatu proses sistematis untuk secara objektif mendapatkan dan mengevaluasi bukti mengenai asersi tentang kegiatan-kegiatan dan kejadian-kejadian ekonomi untuk meyakinkan tingkat keterkaitan antara asersi tersebut dan kriteria yang telah ditetapkan dan mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Menurut Leo Harbert Dalam Rai (2008) terdapat 3 pihak yang saling berkaitan dalam kegiatan audit , yaitu: (1) entitas pemeriksa (auditor), (2) entitas yang diaudit (auditee), dan (3) entitas yang meminta pertanggungjawaban. Hubungan antara ketiganya dapat dilihat pada gambar 2.1



Gambar 2.1 Hubungan Audit

Sumber: Leo Harbert, auditing the performance managemen, (Belmon, Californi:Wadswort, In., 1979, hal. 5 dalam Rai (2008: 28)

2. Jenis-jenis audit

Adapun jenis-jenis audit dibagi menjadi 3 bagian yaitu:

a. Audit Laporan Keuangan

Adalah jenis pekerjaan audit untuk menentukan apakah keseluruhan laporan keuangan yang telah diungkapkan telah memenuhi kriteria yang ditentukan. Dalam hal ini kriteria yang ditentukan tersebut adalah prinsip akuntansi yang telah diterima adalah standar akuntansi keuangan (SAK) yang dikeluarkan oleh ikatan akuntansi Indonesia (IAI). Laporan keuangan dalam hal ini adalah laporan yang meliputi laporan posisis keuangan, laporan laba rugi, laporan posisi kas, beserta catatan atas laporan yang menyertai laporan keuangan itu sendiri.

b. Audit Oprasional

Adalah suatu pekerjaan audit dengan melakukan tinjau-ulang (review) atas satu atau bagian dari metode dan prosedur oprasi

organisasi dengan tujuan untuk mengevaluasi efisiensi dan efektifitas operasi yang terkait.

c. Audit Kepatuhan

Suatu pekerjaan pekerjaan audit dengan tujuan untuk menentukan apakah pihak yang di audit telah memenuhi prosedur atau aturan tertentu yang telah ditetapkan oleh lembaga yang lebih tinggi .hasil penelitian audit ini biasanya berupa laporan untuk pihak-pihak di dalam organisasi , bukan untuk pihak di luar organisasi.

E. Opini Audit

1. Pengertian Opini Audit

Undang-undang nomor 15 tahun 2014 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara menyatakan bahwa opini merupakan pernyataan professional sebagai kesimpulan pemeriksaan mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria (i) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (ii) kecukupan pengungkapan, (iii) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (iv) efektivitas pengendalian internal.

2. Jenis-Jenis Opini Audit

Adapun beberapa Jenis opini audit yang ada dalam standar Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia terdiri dari empat opini, yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP/unqualified opinion), Wajar Dengan Pengecualian (WDP/Qualified opinion), Tidak Wajar (TW/Adverse opinion) dan Tidak Memberikan Pendapat (TMP/Disclaimer opinion).

a. Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP/Unqualified Opinion)

Yaitu pemeriksaan yang telah dilaksanakan sesuai dengan standar auditing yang telah ditentukan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia, seperti yang terdapat dalam standar profesional akuntan publik, dan telah mengumpulkan bahan-bahan pembuktian (audit evidence) yang cukup untuk mendukung opininya, serta tidak menemukan adanya kesalahan material atas penyimpangan dari SAK/ETAP/IFRS, maka auditor dapat memberikan Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian, auditor menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas suatu entitas sesuai dengan SAK/ETAP/IFRS.

b. Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian dengan Bahasa Penjelasan yang Ditambahkan dalam Laporan Audit Bentuk Baku

Pendapat ini diberikan jika terdapat keadaan tertentu yang mengharuskan auditor menambahkan paragraf penjelasan (bahasa penjelasan lain) dalam laporan audit, meskipun mempengaruhi pendapat wajar tanpa pengecualian yang dinyatakan oleh auditor.

c. Pendapat Wajar dengan Pengecualian (WDP/Qualified opinion)

Pendapat wajar dengan pengecualian menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material. Posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas dan arus kas sesuai dengan

SAK/ETAP/IFRS, kecuali untuk dampak hal yang berkaitan dengan yang dikecualikan.

d. Pendapat Tidak Wajar (TW/*Adverse opinion*)

Suatu pendapat tidak wajar menyatakan bahwa laporan keuangan tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas dan arus kas sesuai dengan SAK/ETAP/IFRS. Pendapat ini dinyatakan bila, menurut pertimbangan auditor, laporan keuangan secara keseluruhan tidak disajikan secara wajar sesuai dengan SAK/ETAP/IFRS.

e. Pernyataan Tidak Memberikan Pendapat (*TMP/Disclaimer Opinion*)

Suatu pernyataan tidak memberikan pendapat menyatakan bahwa auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan. Auditor dapat tidak menyatakan suatu pendapat bilamana ia tidak dapat merumuskan atau tidak merumuskan suatu pendapat tentang kewajaran suatu laporan keuangan sesuai dengan SAK/ETAP/IFRS. Jika auditor menyatakan tidak memberikan pendapat, laporan auditor harus memberikan semua alasan substantif yang mendukung pernyataan tersebut.

F. Standarisasi Opini Wajar Tanpa Pengecualian

BPK-RI dalam memberikan opini WTP memiliki kriteria-kriteria pemberian opini WTP. Hal ini berdasarkan dengan UU No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan Keuangan Negara terdiri dari 4 standarisasi opini WTP diantaranya:

1. Laporan keuangan tersebut sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP) dalam hal ini sesuai dengan PP 71 tahun 2010 (sebelumnya PP 24 tahun 2005).
2. Adanya kecukupan pengungkapan (adequate disclosure).
3. Adanya kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
4. Adanya efektivitas sistem pengendalian intern (SPI) yang tercantum dalam PP No. 60 tahun 2008.

Dalam penjelasan UU No. 15 tahun 2004 pasal 1 butir 1 juga disebutkan bahwa "Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Terdapat lima jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa yaitu opini wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion), Pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelasan yang ditambahkan dalam laporan audit bentuk baku (Unqualified Opinion with Explanatory language), opini wajar dengan pengecualian (qualified opinion), opini tidak wajar (adversed opinion), tidak memberikan pendapat (disclaimer of opinion). Opini auditor merupakan sebuah bentuk pernyataan atas keyakinan dari akuntan publik tentang pengungkapan laporan keuangan yang bebas dari salah saji material. Selain itu, opini dari auditor juga akan digunakan sebagai bahan pertimbangan investor saat akan mengambil keputusan (Tuanakotta, 2010). Hal ini juga diungkapkan oleh Arens et al. (2010) yang menyatakan bahwa pengguna laporan keuangan sangat bergantung pada opini yang diberikan oleh auditor. Dari penjelasan di atas, terungkap bahwa opini adalah sesuatu yang sangat penting dan auditor sebagai pemeriksa laporan keuangan

diharapkan bertindak secara profesional untuk memberikan opini sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP).

G. Upaya Pemerintah dalam Meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Upaya yang dilakukan pemerintah dalam meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah yaitu :

1. Profesionalitas kerja Pemerintah Daerah
2. Menambah Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas
3. Apresiasi dan Motivasi dari Pimpinan
4. Dibentuknya Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD)

Dari Keempat upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah tidak terlepas dari beberapa aspek dalam pengelolaan keuangan daerah, yaitu :

a. Perencanaan

Tahap pertama dalam pengelolaan keuangan daerah adalah perencanaan. Dimana segala sesuatu yang akan dikerjakan harus direncanakan terlebih dahulu.

b. Pelaksanaan

Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan.

Sumber Daya Manusia yang berkualitas juga merupakan salah satu hal yang penting dalam suatu organisasi.

c. Penatausahaan

Pemerintah Daerah wajib membuat catatan-catatan yang berkaitan dengan rincian secara tertulis dalam mengelola keuangan daerah.

d. Pelaporan

Pelaporan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan bawahan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode tertentu. Pelaporan dilakukan kepada atasan kepada siapa bawahan tersebut bertanggung jawab. Dalam menyusun suatu laporan keuangan, sangat diperlukan orang-orang yang berkompeten yang memang mengerti dalam bidang tersebut. Karena jika salah sedikit saja bisa fatal akibatnya bagi daerah tersebut.

e. Pengawasan

Sejak adanya kebebasan bagi setiap daerah dalam membangun daerahnya, masing-masing daerah tersebut juga mempunyai tanggung jawab terhadap pemerintah pusat dalam bentuk penyerahan Laporan Keuangan Daerah. Setiap Laporan Keuangan Daerah tersebut di periksa dan dinilai keabsahannya. Bagi daerah yang sudah mempunyai kriteria dalam penerimaan opini WTP maka akan diberikan penghargaan oleh BPK RI.

H. Tujuan Empiris

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk membandingkan penelitian sebelumnya dengan penelitian saat ini. Adapun beberapa penelitian sebelumnya antara lain :

Eko Susilo Haryadi, Kamaliah, Vince Ratnawati melakukan penelitian dengan judul Analisis Pengungkapan (Disclosure) laporan keuangan kabupaten yang meraih opini audit wajar tanpa pengecualian (WTP) dua tahun berturut-turut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pengungkapan atau (disclosure) yang dilakukan oleh kabupaten dalam meraih opini WTP dua tahun berturut-turut telah memenuhi pengungkapan pernyataan Peraturan Pemerintah No 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah. Kemudian peneliti membandingkan pengungkapan dengan pemerintah daerah yang memperoleh opini WDP memang berbeda tingkat kelengkapan pengungkapannya. (Eko Susilo Haryadi, Kamaliah, Vince Ratnawati 2010).

Marjulin melakukan penelitian dengan judul Analisis Pengungkapan Laporan Keuangan Kota Banda Aceh Dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penelitian ini dapat dikemukakan Laporan Keuangan Pengungkapan disajikan di Banda Aceh telah memberikan informasi yang mengungkapkan yang harus diungkapkan dalam Laporan Keuangan presentasi. (Marjulin 2012).

Desi Fatimah, Ria Nelly Sari, M. Rasuli melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Kepatuhan Terhadap

Peraturan Perundang-Undangan, Opini Audit Tahun Sebelumnya Dan Umur Pemerintah Daerah Terhadap Penerimaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian Pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Diseluruh Indonesia. Dari hasil penelitian ini menunjukkan 2.401 sampel data opini yang diolah dan dianalisis, setelah dilakukan uji outlier untuk menghasilkan data yang lebih baik, terdapat 257 sampel yang harus dikeluarkan dalam penelitian ini karena outlier. Dengan demikian jumlah data yang dapat dianalisis menjadi 2.144 sampel. (Desi Fatimah, Ria Nelly Sari, M. Rasuli 2014).

Lalu Riza Ihwandi melakukan penelitian dengan judul Analisis terhadap opini BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten Lombok timur provinsi nusa tenggara barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa opini Wajar dengan Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan diberikan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur disebabkan adanya temuan kasus ketidaksesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, Ketidakefektifan Sistem Pengendalian Intern dan Ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan yang berlaku. (Lalu Riza Ihwandi 2016).

Yuswar Efendy melakukan penelitian dengan judul Tinjauan Opini Wtp BPK Dengan Kasus Korupsi Pada Pemda Di Indonesia Kajian Manajemen Keuangan Pemerintah, Hubungan Antara Masyarakat, Pemerintah Dan Pemeriksa (Auditor). Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Opini BPK atau hasil audit BPK tidak dapat dipastikan bahwa dapat menjamin baik dan buruknya pengelolaan keuangan, karena harus dapat diyakini pemeriksaan kewajaran dalam pemeriksaan yang bebas

dan mandiri. Untuk dapat meyakini Opini, pemeriksaan harus memenuhi kriteria penilaian kewajaran. (Yuswar Efendy 2011).

Wawan Darmawan melakukan penelitian dengan judul Pemaknaan Proses Menuju Opini WTP: Sebuah Etnometodologi di Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peneliti menyatakan opini WTP yang diraih ternyata berawal dari ambisi atau komitmen pemimpin yang berkeinginan keras meraih opini WTP selama beliau menjabat menjadi gubernur. Secara sosial, ambisi atau komitmen gubernur ini menjadikan seluruh pegawai di lingkungan pemerintah provinsi bekerja keras dan sebaik mungkin menyelesaikannya laporan keuangannya sesuai dengan SAP.

Table 2.1

Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Metode	Hasil penelitian
1.	Eko Susilo Haryadi, Kamaliah, Vince Ratnawati (2015)	Analisis Pengungkapan (Disclosure) laporan keuangan kabupaten yang meraih opini audit wajar tanpa pengecualian (WTP) dua tahun berturut-turut	Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif	Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pengungkapan atau (disclosure) yang dilakukan oleh kabupaten dalam meraih opini WTP dua tahun berturut-turut telah memenuhi pengungkapan pernyataan peraturan pemerintah no 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah. Kemudian peneliti membandingkan pengungkapan dengan pemerintah daerah. yang memperoleh opini WDP memang berbeda tingkat kelengkapannya.

2.	Marjulin (2012)	Analisis Pengungkapan Laporan Keuangan Kota Banda Aceh Dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian	Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data melalui teknik observasi dan analisis	Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penelitian ini dapat dikemukakan Laporan Keuangan Pengungkapan disajikan di Banda Aceh telah memberikan informasi yang mengungkapkan yang harus diungkapkan dalam Laporan Keuangan presentasi.
3.	Desi Fatimah, Ria Nelly Sari, M.Rasuli (2014)	Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan, Opini Audit Tahun Sebelumnya Dan Umur Pemerintah Daerah Terhadap Penerimaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian Pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Diseluruh Indonesia.	Metode ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis statistik deskriptif dan inferensial menggunakan software SPSS.	Dari hasil penelitian ini menunjukkan 2.401 sampel data opini yang diolah dan dianalisis, setelah dilakukan uji outlier untuk menghasilkan data yang lebih baik, terdapat 257 sampel yang harus dikeluarkan dalam penelitian ini karena outlier. Dengan demikian jumlah data yang dapat dianalisis menjadi 2.144 sampel.
4.	Lalu Riza Ihwandi (2016)	Analisis terhadap opini BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten Lombok timur provinsi nusa tenggara barat	Metode penelitian deskriptif () menggunakan data kuantitatif dan kualitatif.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa opini Wajar dengan Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan diberikan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur disebabkan adanya temuan kasus ketidaksesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, Ketidakefektifan Sistem Pengendalian Intern dan Ketidapatuhan terhadap perundang-undangan yang berlaku.
5.	Yuswar Efendy	Tinjauan Opini Wtp BPK	Metode penelitian ini	Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Opini

	(2011)	Dengan Kasus Korupsi Pada Pemda	menggunakan wawancara	BPK atau hasil audit BPK tidak dapat dipastikan bahwa dapat menjamin baik dan buruknya pengelolaan keuangan, karena harus dapat diyakini pemeriksaan kewajaran dalam pemeriksaan yang bebas dan mandiri. Untuk dapat meyakini Opini, pemeriksaan harus memenuhi kriteria penilaian kewajaran.
6.	Wawan Darmawan (2017)	Pemaknaan Proses Menuju Opini WTP: Sebuah Etnometodologi di Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan	Metode penelitian ini menggunakan metode wawancara	Dari hasil penelitian ini Peneliti menemukan bahwa opini WTP yang diraih ternyata berawal dari ambisi atau komitmen pemimpin yang berkeinginan keras meraih opini WTP selama beliau menjabat menjadi gubernur. Secara sosial, ambisi atau komitmen gubernur ini menjadikan seluruh pegawai di lingkungan pemerintah provinsi bekerja keras dan sebaik mungkin menyelesaikannya laporan keuangannya sesuai dengan SAP.

I. Kerangka Konseptual

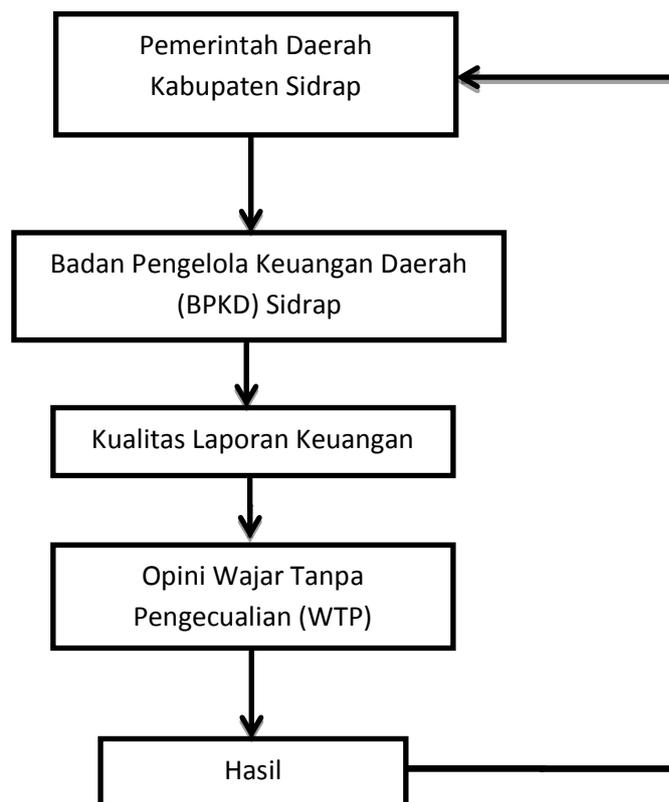
Upaya dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara maka Pemerintah Daerah berkewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah. Atas laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah tersebut akan dinilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasinya oleh BPK RI dengan melakukan pemeriksaan yang hasilnya dituangkan dalam bentuk laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah yang memuat opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah. Dari beberapa opini yang dapat diterbitkan BPK RI,

Opini WTP merupakan opini tertinggi yang dicita-citakan oleh semua pemerintah daerah. Karena perolehan opini WTP merupakan suatu prestasi dan kebanggaan tersendiri bagi pemerintah daerah bersangkutan.

Adapun beberapa gambaran skema dari hasil pemikiran maka peneliti dapat merangkai dalam bentuk kerangka sebagai berikut. Dari hasil penelitian pemerintah daerah dikelola oleh BPKD sehingga BPK RI memberikan predikat opini WTP pada pemerintah daerah kabupaten Sidrap.

Gambar 2.2

**Skema Kerangka Pemikiran
Pemerintah Kabupaten Sidrap**



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian Deskriptif Kualitatif. Menurut Sanusi (2011:13), desain penelitian deskriptif adalah desain penelitian yang disusun dalam rangka memberikan gambaran secara sistematis tentang informasi ilmiah yang berasal dari subjek atau objek penelitian. Penelitian deskriptif berfokus pada penjelasan sistematis tentang fakta yang diperoleh saat penelitian dilakukan. Penelitian ini menguraikan secara kualitatif mengenai upaya-upaya apa yang dilakukan pemerintah Daerah Kabupaten Sidendeng Rappang dalam meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

B. Fokus Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya-upaya apa yang dilakukan pemerintah daerah kabupaten Sidrap dalam mencapai predikat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dan untuk mengetahui tingkat predikat laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten sidrap pada saat ini.

C. Lokasi Dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian untuk memperoleh data adalah di Badan Pengelolah Keuangan Daerah (BPKD) yang berlokasi di Batu Lappa Kecamatan Wattang Pulu Kabupaten Sidrap, Sulasewi Selatan.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini diperkirakan memerlukan waktu sekitar 2 bulan yaitu dari bulan Mei sampai dengan bulan Juli 2018.

D. Sumer Data

Jenis data yang yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang berasal dari sumber asli atau pertama. Data ini tidak tersedia dalam bentuk terkompilasi ataupun dalam bentuk file-file. Data ini harus dicari melalui narasumber atau dalam istilah teknisnya responden, yaitu orang yang kita jadikan objek penelitian atau orang yang kita jadikan sebagai sarana mendapatkan informasi data.

Data primer dapat berupa opini, hasil observasi, hasil penelitian baik secara individu maupun secara kelompok dalam penelitian ini, data diperoleh dari responden dengan cara wawancara langsung kepada pihak yang memang berkompeten dan memahami badan pengelola keuangan daerah (BPKD) kabupaten sidrap.

Adapun yang menjadi narasumber pada penelitian ini yaitu Pimpinanan BPKD yang terdiri dari Kepala Dinas, kepala bidang dan kepala seksi pada pemerintah Daerah Kabupaten Sidrap.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diterbitkan atau digunakan oleh organisasi yang bukan pengolahannya.(Siregar, 2012). Data sekunder merupakan data penunjang bagi penyusun penelitian ini, data ini diperoleh dari informasi berupa buku, internet, *literature* lain atau data

yang sudah ada seperti penelitian ekonomi tentang upaya-upaya pemerintah daerah dalam mencapai WTP yang dikeluarkan oleh BPK-RI yang diperoleh dari jurnal-jurnal penelitian yang sudah ada sebelumnya. Penelitian ini menggunakan data Primer dan data Sekunder.

E. Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Wawancara

Hasan dalam Emzir (2010:50) mendefenisikan wawancara adalah interaksi bahasa yang berlangsung antara dua orang dalam situasi saling berhadapan salah seorang, yaitu yang melakukan wawancara meminta informasi atau ungkapan kepada orang yang diteliti yang berputar di sekitar pendapat dan keyakinannya. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam. Wawancara mendalam yaitu interaksi antara dua orang yang satu disebut pewawancara dan yang lain disebut yang mewawancarai dan sering juga disebut peneliti dan responden. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan bertatap muka secara langsung dengan informan yang dianggap potensial dan mempunyaikapasitas. Informan adalah orang-orang yang dianggap potensial, dalam arti orang-orang tersebut banyak memiliki informasi mengenai masalah yang diteliti. Informan yang dianggap potensial dalam penelitian ini adalah Kepala-kepala bagian dan sub bagian di Badan Pengelolah Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Sidrap. Adapun mengenai komposisi Kepala-kepala Bidang dan sub bagian dapat dilihat di bawah ini.

- I. Kabib Akuntansi dan Pelaporan Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) kabupaten sidendreng Rappang
- II. Kasubid Akuntansi Badan pengelola Keuangan Daerah (BPKD) kabupaten Sidendreng Rappang
- III. Kasubid Informasi dan Pelaporan Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) kabupaten Sidendreng Rappang
- IV. Kabib Pengelolaan Asset Badan pengelola Keuangan Daerah (BPKD) kabupaten Sidendreng Rappang

2. Dokumentasi

Melakukan penghimpunan atas data-data sekunder untuk mendapatkan data yang mendukung penelitian ini. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.

3. Observasi

Menurut Sanusi (2011:77), Observasi adalah kegiatan yang dilakukan secara langsung untuk melihat objek agar peneliti dapat mengumpulkan data yang diharapkan sesuai dengan tujuan peneliti kasus, terlebih dahulu peneliti mempersiapkan catatan atau alat observasi, baik hanya sekedar daftar cek atau sekedar penilaian.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam. Adapun yang dimaksud dari wawancara mendalam yaitu interaksi antara dua orang yang satu disebut pewawancara dan yang lain disebut yang mewawancarai dan sering juga disebut peneliti dan responden.

Wawancara adalah pertemuan antara dua orang untuk berukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Menurut Sugiyono (2012:233) mengemukakan beberapa macam wawancara yaitu wawancara terstruktur (peneliti telah mengetahui dengan pasti informasi apa yang akan diperoleh sehingga peneliti menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan tertulis yang alternative dan jawabannya pun telah disiapkan), wawancara semiterstruktur (pelaksanaan wawancara lebih jelas, dan bertujuan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka dimana responden diminta untuk memberikan pendapat dan ide-idenya).

G. Teknik Analisis Data

Untuk analisis data, peneliti akan melakukan analisa data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data, seperti wawancara, dokumentasi, serta sumber data yang telah ada. Diantaranya adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan Sugiyono (2009,247-253) menjelaskan sebagai berikut :

1. Reduksi data adalah membuat kategori berdasarkan macam atau jenis yang sama, membuang data yang tidak diperlukan. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas.
2. Penyajian data adalah melakukan penyajian dengan memisahkan pola yang berbeda sesuai dengan jenis dan macamnya sehingga strukturnya mudah untuk dipahami.
3. Penarikan kesimpulan adalah kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang merupakan jawaban rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah singkat Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD)

Unit Satuan Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang terbentuk berdasarkan peraturan daerah Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten serta pedoman pelaksanaan tugas pokok dan Fungsinya berdasarkan peraturan Bupati Sidenreng Rappang No 31 Tahun 2008 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Pengelolah Keuangan Daerah.

Setelah dibentuknya peraturan pemerintah no 41 tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah berubah struktur dan merupakan salah satu dari 8 (delapan) unit satuan kerja badan lingkup pemerintah kabupaten sidendreng rappang yang membawahi 1 sekretaris, 4 bidang, 3 sub bagian, dan 8 sub bidang. Terbentuk berdasarkan peraturan daerah kabupaten sidendreng rappang nomor 04 tahun 2008 tentang organisasi lembaga teknis daerah .

Berdasarkan keputusan bupati sidenreng rappang no 31 tahun 2008 tentang tugas pokok, fungsi, uraian tugas dan tata kerja badan pengelolah keuangan daerah. Satuan kerja badan pengelolah keuangan daerah yang bertugas melaksanakan sebagian kewenangan pemerintah dibidang pengelolaan keuangan daerah dipimpin oleh seorang kepala badan (pemangku jabatan eselon II b) yang sebagai kepala satuan kerja

perangkat daerah juga bertugas sebagai pejabat pengelola keuangan daerah dan pelaksana fungsi bendahara umum daerah.

Dari rumusan tersebut diatas, maka dapat dikatakan bahwa satuan kerja perangkat daerah badan pengelola keuangan daerah merupakan unit organisasi pemerintah daerah pelaksana fungsi staf yang bertugas merumuskan kebijakan umum dibidang pengelola keuangan dan aset daerah, melaksanakan perbendaharaan, dan melaksanakan akuntansi pemerintah daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi diperlukan sebuah kebijakan sebagai petunjuk, pedoman serta sasaran yang ingin dicapai. Kebijakan itu diwujudkan dalam sebuah rencana strategis yang digunakan sebagai dasar penilaian kinerja.

2. Visi dan Misi Organisasi

a. Visi

“Terwujudnya Pengelola Keuangan Daerah yang Profesional”

b. Misi

1. Melaksanakan urusan umum dan ketatalaksanaan bidang kepegawaian, keuangan dan perencanaan BPKD
2. Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan sistem anggaran daerah
3. Menyelenggarakan perumusan kebijakan dan memberikan pelayanan administrasi perbendaharaan.
4. Menyelenggarakan dan pengembangan sistem dan mekanisme pelaporan dan akuntansi keuangan dan aset daerah
5. Menyelenggarakan pengendalian anggaran agar lebih berorientasi efisiensi dan efektivitas

6. Menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat

3. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi memegang peranan yang amat penting, karena menyangkut tugas dan tanggung jawab para pegawai yang ada didalamnya. Struktur organisasi dibuat agar maksud dan tujuan organisasi dapat tercapai dengan baik karena dengan adanya struktur organisasi terdapat pembagian tugas dan tanggungjawab yang baik.

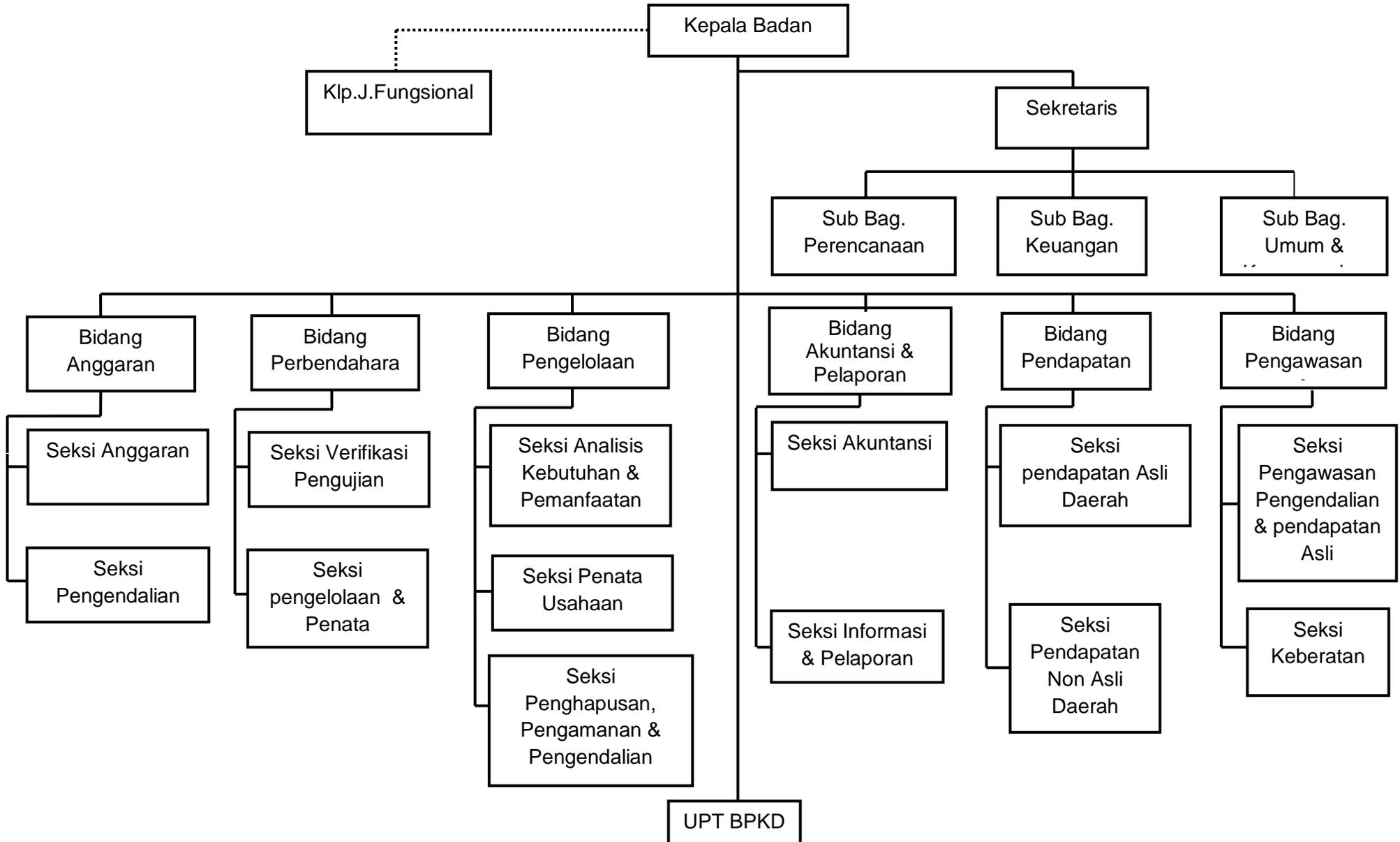
Pengorganisasian merupakan suatu proses yang dimaksudkan untuk menciptakan kerjasama dan hubungan yang harmonis antara bagian-bagian dalam suatu organisasi. Bagian-bagian yang dimaksudkan itu adalah orang-orang yang melaksanakan pekerjaan, alat yang digunakan serta metode yang digunakan dalam pengorganisasian. Bagian-bagian tersebut tergambar dalam struktur organisasi.

Sesuai dengan peraturan Daerah Kabupaten Sidandeng Rappang No.4 tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja lembaga teknis Daerah Kabupaten Sidrap maka struktur organisasi BPKD kabupaten sidrap sebagai berikut :

1. Kepala Badan
2. Sekretaris badan
 - a. Sub Bagian Perencanaan
 - b. Sub Bag Keuangan
 - c. Sub Bag Umum Kepegawaian
3. Bidang Anggaran
 - a. Sub Bidang Anggaran
 - b. Sub Bid Pengendalian

4. Bidang Perbendaharaan
 - a. Sub Bidang Verifikasi dan Pengujian
 - b. Sub Bidang Pengelolaan dan Penata Usahaan
5. Bidang Pengelolaan Asset
 - a. Sub Bidang Perencanaan dan Pemeliharaan
 - b. Sub Bidang Inventarisasi dan Penghapusan
6. Bidang Pelaporan dan Akuntansi
 - a. Sub Bidang Akuntansi
 - b. Sub Bidang Informasi dan Pelaporan
7. UPT Badan
8. Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar 4. 1 Struktur Organisasi



4. Uraian Pekerjaan

a. Kepala Badan

Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Sidendeng Rappang mempunyai tugas yaitu :

1. Merumuskan dan menetapkan rencana strategis serta rencana anggaran satuan kerja badan
2. Menyelenggarakan administrasi umum
3. Membina dan mengkoordinasikan sekretariat dan bidang-bidang di lingkup badan
4. Mengarahkan dan membuat petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dengan instansi terkait
5. Mengarahkan dan membuat petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis bidang pengelolaan keuangan daerah
6. Melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan membuat laporan secara berkala

b. Sekretaris Badan

Sekretaris badan pengelola keuangan daerah mempunyai tugas pokok yaitu :

1. Mengkaji dan merumuskan rencana strategis dan rencana anggaran satuan kerja dari setiap bidang dalam lingkup badan pengelola keuangan daerah

2. Menghimpun dan mengkompilasi rencana strategis dan rencana anggaran satuan kerja dari setiap bidang dalam lingkup badan pengelola keuangan daerah
3. Melaksanakan urusan umum dan ketatalaksanaan bidang kepegawaian, keuangan serta perencanaan badan pengelola keuangan daerah
4. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan sekretariat dan membuat laporan secara berkala

c. Kepala bidang Anggaran

Kepala bidang Anggaran mempunyai tugas pokok yaitu :

1. Mengkaji dan merumuskan rancangan rencana strategis dan rancangan rencana kerja anggaran bidang
2. Mengkordinasikan dengan kepala badan , sekretaris dan kepala-kepala bidang lingkup badan pengelola keuangan daerah
3. Membina dan mngkordinasikan para kepala sub bidang di lingkup bidang anggaran
4. Menyelenggarakan administrasi umum
5. Menyelenggaraan pembinaan dan pembangunan sistem anggaran daerah
6. Melaksanakan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan tugas serta membuat laporan secara berkala

d. Kepala Bidang Perbendaharaan

Kepala bidang perbendaharaan mempunyai tugas pokok yaitu :

1. Mengkaji dan merumuskan rancangan rencana strategis dan rancangan rencana anggaran satuan kerja bidang
2. Mengkordinasikan dengan kepala badan, sekretaris dan kepala-kepala bidang lingkup badan pengelolah keuangan daerah
3. Membina dan mengkordinasikan sub bidang di lingkup bidang perbendaharaan
4. Menyelenggarakan perumusan kebijakan dan memberikan pelayanan administrasi perbendaharaan
5. Melaksanakan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan tugas serta membuat laporan secara berkala

e. Kepala Bidang Pengelolaan Asset

Kepala Bidang pengelolaan Asset mempunyai tugas pokok yaitu :

1. Mengkaji dan merumuskan rancangan rencana strategis dan rancangan rencana satuan kerja bidang
2. Mengkordinasikan dengan kepala badan, sekretaris dan kepala – kepala badan lingkup Badan Pengelolah Keuangan Daerah
3. Membina dan mengkordinasikan sub bidang di lingkup bidang pengelolaan asset
4. Menyelenggarakan administrasi umum
5. Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan administrasi dan manajemen pengelolaan asset daerah serta membuat laporan secara berkala.

f. Bidang pelaporan dan Akuntansi

Bidang pelaporan dan akuntansi mempunyai tugas pokok :

1. perumusan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan Bidang Akuntansi;
2. pelaksanaan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan Bidang Akuntansi;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan fungsi penunjang keuangan Bidang Akuntansi;
4. pelaksanaan administrasi fungsi penunjang keuangan Bidang Akuntansi; dan
5. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

B. Informan Penelitian

Salah satu teknik pengumpulan data yang yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik wawancara. Wawancara dilakukan dengan informan yang dianggap potensial untuk memberikan informasi yang dibutuhkan dalam peneelitian ini. Informan dalam penelitian ini adalah :

1. Kabib Akuntansi dan Pelaporan Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) kabupaten sidendreng Rappang
2. Kasubid Akuntansi Badan pengelola Keuangan Daerah (BPKD) kabupaten sidendreng rappang
3. Kasubid Pelaporan Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) kabupaten sidendreng rappang

4. Kabid Pengelolaan Asset Badan pengelola Keuangan Daerah (BPKD) kabupaten sidendreg rappang

C. Hasil Penelitian

Untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini maka perlu diuraikan terlebih dahulu mengenai tingkat predikat opini yang diraih dari tahun ke tahun dan upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sidendreg Rappang dalam Meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI. Hal tersebut perlu diuraikan terlebih dulu untuk lebih mengetahui upaya-upaya sebenarnya yang dilakukan Pemerintah daerah Kabupaten sidendreg Rappang.

Maka dari itu peneliti mengajukan beberapa pertanyaan dengan melakukan wawancara yang dilakukan kepada ke empat informan yaitu bapak Arifuddin .S (Kabid Akuntansi & Pelaporan BPKD), Sunandar.P (Kabid Pengelolaan Asset BPKD), Fadli Yakub (Kasubid Akuntansi BPKD), Irwan (Kasubid Pelaporan BPKD),

1. Opini BPK-RI Atas LKPD Kabupaten Sidendreg Rappang Dari Tahun Ke Tahun

Salah satu lembaga pengawasan fungsional eksternal pemerintah adalah BPK. Dalam melakukan pengawasan, BPK melakukan kegiatan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Laporan hasil pemeriksaan tersebut menghasilkan opini atas LKPD yang diperiksa. Salah satu yang mempengaruhi opini tersebut adalah penilaian terhadap sistem pengendalian intern yang diterapkan oleh entitas.

Undang-undang nomor 15 tahun 2014 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara menyatakan bahwa opini merupakan pernyataan professional sebagai kesimpulan pemeriksaan mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria (i) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (ii) kecukupan pengungkapan, (iii) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (iv) efektivitas pengendalian internal.

Tabel. 4.3

Tabel Kriteria Penilaian untuk Mendapat Opini WTP

No	Kriteria Opini WTP	Keterangan
1	kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah	Terpenuhi
2	Efektivitas penilaian internal	Terpenuhi
3	Kecukupan pengungkapan informasi	Terpenuhi
4	Kepatuhan pada peraturan perundang-undangan	Terpenuhi

Sumber: IHPS BPK RI tahun 2018

Dari tabel 4.3 yang menyajikan kriteria penilaian diberikannya opini WTP dari BPK RI. Ada 4 kriteria yang sudah ditetapkan oleh BPK untuk bisa mencapai predikat WTP .

Opini merupakan suatu penilaian yang sangat penting bagi setiap pemerintahan, dimana Wajar Tanpa Pengecualian merupakan opini tertinggi yang diberikan atas kewajaran laporan keuangan. Opini BPK atas LKPD Kabupaten Sidendreg Rappang menunjukkan bahwa opini yang diperoleh dari tahun ke tahun merupakan opini Wajar Dengan Pengecualian namun pada tahun 2017 mengalami peningkatan, Pemerintah Daerah Kabupaten Sidrap telah memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK-RI. Berikut Opini BPK atas LKPD Kabupaten sidrap dalam lima tahun terakhir.

Tabel. 4.4

Opini BPK atas LKPD Kabupaten Sidrap Tahun 2012-2017 Pemeriksaan Opini

Laporan Keuangan	Tahun Pemeriksaan	Opini
Tahun 2012	2013	WDP
Tahun2013	2014	WDP
Tahun 2014	2015	WDP
Tahun 2015	2016	WDP
Tahun 2016	2017	WTP
Tahun 2017	2018	-

Sumber: IHPS BPK dari berbagai Tahun (diolah tahun 2018)

Dalam tabel 4.3 yang menyajikan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sidrap dari TA 2012-2016 terlihat bahwa opini yang diraih selama beberapa tahun adalah WDP dan pada tahun 2017 terlihat bahwa BPK telah memberi opini WTP untuk pertama kalinya sehingga peneliti dapat menyimpulkan bahwa tingkat predikat laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten sidrap mengalami peningkatan.

Menurut informasi dari BPK Perwakilan Sulawesi Selatan, Kabupaten Sidrap baru pertama kali mendapat opini WTP selama 5 tahun tersebut. Hal tersebut dikarenakan adanya aset tetap yang tidak didukung dengan pencatatan dan pelaporan yang memadai, penatausahaan kas yang tidak sesuai dengan ketentuan, penyertaan modal yang belum ditetapkan dengan peraturan daerah, saldo saldo dana bergulir yang belum disajikan dengan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), penatausahaan persediaan yang tidak memadai, serta pelaksanaan belanja modal, barang dan jasa yang tidak sesuai dengan ketentuan.

2. Peranan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Terhadap Laporan Keuangan pada BPKD Kabupaten Sidrap

Opini audit merupakan suatu simbol kepercayaan publik terhadap kredibilitas dan kehandalan informasi yang terkandung dalam suatu laporan keuangan. Opini merupakan suatu penilaian yang sangat penting bagi setiap pemerintahan. WTP artinya laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan (*neraca*), laporan realisasi anggaran (*LRA*), laporan arus kas, sesuai dengan prinsip akuntansi yang

berlaku. Penjelasan laporan keuangan telah disajikan secara memadai, informatif dan tidak menimbulkan penafsiran yang menyesatkan.

Wajar dimaksudkan bahwa laporan keuangan bebas dari keraguan dan ketidakjujuran serta lengkap informasinya. Pengertian wajar tidak hanya terbatas pada jumlah-jumlah dan ketetapan pengklasifikasian aktiva dan kewajiban, namun yang terpenting meliputi pengungkapan yang tercantum dalam laporan keuangan. Maka dari itu peneliti mengajukan pertanyaan dengan melakukan wawancara yang dilakukan kepada ke empat informan yaitu bapak Arifuddin .S (Kabid Akuntansi & Pelaporan BPKD), Sunandar.P (Kabid Pengelolaan Asset BPKD), Fadli Yakub (Kasubid Akuntansi BPKD), Irwan (Kasubid Pelaporan BPKD), Adapun beberapa pertanyaan diantaranya:

Bapak Arifuddin.S mengatakan bahwa :

“Opini itu Sangat penting bagi setiap pemerintahan, Alasannya itu bahwa setiap pemda yang mempunyai opini WTP itu mempengaruhi penilaian prestasi daerah dalam hal pengelolaan keuangan, namun bukan berarti bahwa dengan memperoleh opini WTP bukan berarti bahwa tidak ada kesalahan dalam pemerintahan tersebut, jika suatu pemerintahan mampu dalam memperoleh opini WTP maka pemerintahan tersebut diakui bahwa mereka mampu dalam menyajikan laporan keuangannya secara wajar dan semua hal yang material, Opini WTP adalah opini tertinggi yang dikeluarkan oleh BPK RI dalam melakukan audit, bagi suatu pemerintah bila mampu dalam meraih opini WTP maka pemerintahan tersebut mendapat insentif dari pusat misalnya insentif pembangunan dll ”

Makna dari keterangan informasi yang diberikan oleh bapak Arifuddin di atas dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada hari Rabu tanggal 2 Mei 2018 bahwa peran opini dalam suatu pemerintahan itu sangat penting, seperti diketahui bahwa opini WTP adalah opini tertinggi yang

dikeluarkan oleh BPK RI. Setiap pemerintah daerah yang memperoleh opini WTP sangat mempengaruhi penilaian prestasi daerah tersebut dalam hal pengelolaan keuangan. Namun bukan berarti dengan memperoleh opini WTP maka pemerintahan tersebut bebas dari kesalahan. Hanya saja jika suatu pemerintahan mampu dalam meraih opini WTP maka pemerintahan tersebut diakui oleh Pusat dan akan mendapat insentif tersendiri oleh pemerintah pusat misalnya insentif pembangunan daerah.

Penjelasan Bapak Arifuddin diperkuat dengan penjelasan bapak Fadli Yakub mengatakan bahwa :

“Kalau dikatakan apakah penting, jawabannya pasti penting karena yang namanya opini itu mengukur atau menilai mengenai kualitas laporan keuangan. Opini itu kalau tidak salah ada 5 opini, yang paling tertinggi adalah opini wajar tanpa pengecualian jadi opini itu menggambarkan kualitas laporan keuangan, kalau misalkan kinerja keuangannya bagus itu berdampak pada kinerja pemerintah yang *survive*, kalau kinerja mengenai laporan keuangan tidak bagus maka berarti pengelolaan keuangan pemerintah juga ada masalah, jadi itulah mengapa opini audit sangat penting karena berpengaruh pada kualitas pemerintahan itu sendiri ketika laporan keuangan opininya bagus maka secara keseluruhan penilaian pemerintahan khususnya dibidang keuangan itu bagus”

Makan dari penjelasan salah satu informan yang juga merupakan hasil dari wawancara yang dilakukan peneliti pada hari Rabu tanggal 2 Mei 2018 oleh Bapak Fadli Yakub bahwa setiap pemerintahan sangat membutuhkan yang namanya opini audit karena opini tersebut merupakan suatu ukuran mengenai kualitas laporan keuangan daerah tersebut. Seperti diketahui bahwa opini itu ada 5 yaitu, Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian dengan Bahasa Penjelasan yang

Ditambahkan dalam Laporan Audit Bentuk Baku, Wajar dengan Pengecualian (WDP), Pendapat Tidak Wajar (PTW), Tidak Memberikan Pendapat (disclaimer) dan opini tertinggi yang dikeluarkan oleh BPK RI adalah opini WTP. Jadi opini itu dapat menggambarkan kualitas laporan keuangan suatu pemerintahan kalau misalkan opini yang diraihnyanya bagus maka secara penilaian pemerintahan tersebut cukup bagus khususnya dibagian keuangannya.

Sedangkan menurut bapak Sunandar.S mengatakan bahwa”

“kalau opini itu bukan sekedar opini, sebetulnya itu merupakan bentuk penilaian. Opini bentuk penilaian pemeriksaan bahwa kualitas laporan keuangan itu sebagai mana hasilnya, Sidrap memperoleh opini WTP artinya itu penghargaan tertinggi untuk kinerja laporan keuangan. Misal sidrap 2017 dapat WTP berarti secara kinerja keuangan sudah wajar namun itu artinya bukan terbebas dari kesalahan tapi wajar dalam sebuah laporan keuangan, Wajar yang dimuat dengan materilitas dengan tingkat kesalahan yang kecil tidak berpengaruh”

Artinya bahwa opini yang diraih oleh suatu pemerintahan sebetulnya adalah bentuk dari penilaian khususnya di bagian keuangan, jika pada tahun 2017 kabupaten sidrap memperoleh opini WTP dari BPK RI itu berarti merupakan opini tertinggi untuk kinerja laporan keuangan sudah wajar artinya sudah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material namun dengan memperoleh opinii WTP bukan berarti terbebas dari kesalahan namun wajar dalam sebuah laporan keuangan, wajar dengan materilitas tingkat kesalahan yang kecil sehingga tidak berpengaruh atas pemeriksaan audit.

Informasi yang diberikan Bapak Sunandar. S di atas diperkuat dengan penjelasan bapak Irwan mengatakan bahwa:

“iya sangat penting karena itu merupakan sebuah prestasi dalam kinerja laporan keuangan. Jadi kita di keuangan ini yang menjadi indikator penilaian BPK atau penilaian Bupati adalah bagaimana kita mengelola laporan keuangan itu dengan baik tapi pemberian opini WTP bukan berarti semua sudah benar semua. Umpamanya kan wajar tanpa pengecualian semuanya sudah wajar, sudah benar semua, sempurna semua”

Dari hasil wawancara tersebut peneliti mengambil kesimpulan bahwa opini terhadap laporan keuangan itu sangat penting karena opini tersebut merupakan suatu prestasi atau penilaian tersendiri terhadap kualitas laporan keuangan suatu pemerintah. Dimana jika suatu entitas pemerintah mendapat opini WTP maka entitas tersebut dianggap sudah memenuhi syarat dalam memperoleh opini tertinggi.

Opini merupakan suatu penilaian yang sangat penting bagi setiap pemerintahan, dimana Wajar Tanpa Pengecualian merupakan opini tertinggi yang diberikan atas kewajaran laporan keuangan. Opini BPK atas LKPD Kabupaten Sidandeng Rappang menunjukkan bahwa opini yang diperoleh dari tahun ke tahun merupakan opini Wajar Dengan Pengecualian namun pada tahun 2017 mengalami peningkatan, Pemerintah Daerah Kabupaten Sidrap telah memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK-RI.

Hasil penelitian diatas diperkuat oleh wawancara yang dilakukan kepada ke empat informan yaitu bapak Arifuddin .S (Kabid Akuntansi &

Pelaporan BPKD), Sunandar.P (Kabid Pengelolaan Asset BPKD), Fadli Yakub (Kasubid Akuntansi BPKD).,

Bapak Arifuddin.S mengatakan bahwa :

“Opini yang diraih dari tahun ke tahun itu dipengaruhi oleh beberapa faktor yang pertama Sumber daya manusia, yang kedua masalah kedisiplinan/tepat waktu dalam membuat laporan keuangan karena laporan keuangan ditingkat kabupaten adalah hasil dari rekapan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di dalamnya ada 5 macam jenis laporan keuangan yang dibuat sedangkan di Kabupaten ada 7 laporan keuangan yang dibuat, Adapun beberapa upaya-upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang pertama membuat laporan dengan tepat waktu karena di dalam pembuatan L/K pemerintah daerah ada batas waktu yang ditentukan oleh Pemendagri yaitu dinyatakan bahwa waktu paling lambat 3 bulan setelah tahun Anggaran maka Laporan Keuangan (L/K) Daerah sudah di serahkan ke BPK RI untuk di lakukan pemeriksaan audit, upaya yang ke dua yaitu membuat laporan keuangan secara transparan (terbuka) maksud dari transparan yaitu tidak ada satupun yang ditutup-tutupi oleh pihak-pihak yang berwenang, upaya yang ke tiga dapat dijelaskan atau dapat dipertanggungjawabkan artinya semua yang kita sajikan dapat kita jelaskan secara rinci”

Maksud dari penjelasan Bapak Arifuddin diatas dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada hari Rabu tanggal 2 Mei 2018 bahwa Kabupaten Sidrap merupakan salah satu daerah yang memperoleh opinii Wajar Dengan Pengecualian selama beberapa tahun berturut-turut, pada tahun 2017 maka opini yang diperoleh kabupaten Sidrap mengalami peningkatan dari opini WDP menjadi WTP. Opini yang diraih dari tahun ke tahun dipengaruhi oleh beberapa faktor yang pertama Sumber daya manusia, yang kedua masalah kedisiplinan/tepat waktu dalam membuat laporan keuangan, adapun beberapa upaya yang dilakukan pemerintah daerah kabupaten Sidrap dalam meraih opini WTP yaitu yang pertama membuat laporan dengan tepat waktu karena di dalam pembuatan L/K

pemerintah daerah ada batas waktu yang ditentukan oleh Pemendagri yaitu dinyatakan bahwa waktu paling lambat 3 bulan setelah tahun Anggaran maka Laporan Keuangan (L/K) Daerah sudah di serahkan ke BPK RI untuk di lakukan pemeriksaan audit, upaya yang ke dua yaitu membuat laporan keuangan secara transparan (terbuka) maksud dari transparan yaitu tidak ada satupun yang ditutup-tutupi oleh pihak-pihak yang berwenang, upaya yang ke tiga dapat dijelaskan atau dapat dipertanggungjawabkan artinya semua yang kita sajikan dapat kita jelaskan secara rinci”

Penjelasan Bapak Arifuddin di atas diperkuat dengan penjelasan bapak Fadli Yakub yang mengatakan bahwa:

“Namanya upaya pasti ada yang dilakukan oleh semua instansi, upaya yang dilakukan pemerintah kabupaten Sidrap yaitu bagaimana bisa mempertahankan opini tersebut, seperti diketahui bahwa tahun 2016 kemarin mendapat opini WTP yang keluar ditahun 2017 maka yang perlu dilakukan yaitu bagaimana cara atau strategi untuk mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ditahun 2017 tersebut yang akan keluar ditahun 2018 dan persoalan-persoalan yang mungkin menjadi catatan kaki oleh BPK RI maka itu yang kita benahi dulu dan setelah dibenahi, itu yang menjadi temuan-temuan maka lebih ditingkatkani dan diperbaharui lagi tentunya”

Maksud dari penjelasan bapak Fadli Yakub diatas dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada hari Rabu tanggal 2 Mei 2018 beliau mengatakan bahwa setiap pemerintah daerah dalam meraih opini WTP itu pasti ada upaya-upaya yang dilakukan, kalau pemerintah kabupaten Sidrap itu sendiri upaya yang dilakukan yaitu bagaimana setelah mendapat opini WTP, maka bagaiman supaya tetap bisa mempertahankan opini WTP

tersebut dengan cara membenahi seluruh aspek-aspek yang menjadi catatan kaki dan temuan-temuan oleh BPK RI.

Sedangkan menurut bapak Sunandar.S menyatakan bahwa:

“Upaya yang dilakukan yaitu membenahi seluruh aspek yang menjadi temuan atau catatan-catatan kaki oleh BPK RI. Terutama tahun kemarin yang menjadi temuan yaitu kertas kerja asset yang ambradul sehingga pada saat pemeriksaan ada penyajian yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, itulah yang menjadi pembelajaran untuk semua pihak pemerintah Kabupaten Sidrap untuk lebih berhati-hati dalam melakukan penyajian-penyajian laporan keuangan, sehingga pada saat dilakukan pemeriksaan maka tidak ada angka yang tidak bisa kita jelaskan karena jika ada angka yang tidak bisa kita jelaskan maka itu artinya keyakinan dan kepercayaan tidak memadai, jadi itulah yang kita diskusikan supaya kedepannya lebih bagus lagi, intinya tidak ada kata berhenti untuk membenahi”

Dari hasil wawancara tersebut peneliti mengambil kesimpulan bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten Sidrap sangatlah penting baik sebelum mendapat opini WTP maupun sesudah mendapat opini WTP. Upaya sebelum mendapat opini WTP yaitu dengan membenahi seluruh aspek yang menjadi temuan dan catatan kaki oleh BPK-RI dari tahun-tahun pemeriksaan sebelumnya. Beberapa aspek yang dibenahi yaitu Sumber daya manusia, kedisiplinan/tepat waktu dalam membuat laporan keuangan, semua yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dijelaskan dengan rinci dan dapat dimengerti. Adapun Upaya sesudah mendapat opini WTP yaitu mempertahankan opini tersebut dengan cara membenahi segala aspek yang menjadi temuan catatan-catatan kecil oleh BPK-RI.

3. Kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) Sangat Berpengaruh terhadap Opini Audit Pada BPKD Pemerintah Daerah Kabupaten Sidrap

Sumber daya manusia adalah salah satu faktor yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari suatu organisasi, baik institusi maupun perusahaan. SDM juga merupakan kunci yang menentukan perkembangan perusahaan. Pada hakikatnya, SDM merupakan manusia yang dipekerjakan disebuah organisasi sebagai penggerak, pemikir dan perencana untuk mencapai tujuan organisasi. Faktor- faktor mempengaruhi SDM yaitu:

1. Faktor internal
 - a. Rencana strategis
 - b. Anggaran
 - c. Estimasi produksi dan penjualan
 - d. Perluasan usaha atau kegiatan baru
 - e. Rancangan organisasi dan tugas perencanaan
2. Faktor Eksternal
 - a. Situasi ekono
 - b. Sosial-budaya
 - c. Politik
 - d. Peraturan perundang-undangan
 - e. Teknologi
 - f. pesaing

Faktor internal dan eksternal diatas saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain.

Dalam hal ini Sumber daya manusia sangat berperan penting terhadap kelancaran kegiatan suatu instansi, baik ditinjau dari sisi efektifitas pengelolaan keuangan, kemajuan pembangunan, peningkatan daya saing daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, maka dapat disimpulkan jika SDM suatu instansi baik maka hal itu akan berpengaruh terhadap opinii audit yang dikeluarkan oleh BPK RI.

Hasil penelitian diatas diperkuat oleh wawancara yang dilakukan kepada ke empat informan yaitu bapak Arifuddin .S (Kabid Akuntansi & Pelaporan BPKD), Sunandar.P (Kabid Pengelolaan Asset BPKD), Fadli Yakub (Kasubid Akuntansi BPKD), Irwan (Kasubid Pelaporan BPKD).

Bapak Ariffuddin.S mengatakan bahwa:

“Sumber Daya Manusia (SDM) itu sangat mempengaruhi efektifitas laporan keuangan dalam memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) karena yang dibutuhkan adalah faktor SDM dengan ITEnya karena kecepatan mengelola data dengan transparansi itu harus melalui ITE dan juga kita di pemerintahan ini dibantu dengan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) dan sudah selama 4 tahun diterapkan di kabupaten sidrap”

Makna dari penjelasan bapak Arifuddin.S selaku Kepala Bidang Akuntansi dan pelaporan dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada hari Rabu tanggal 2 Mei 2018 mengatakan bahwa SDM sangat berpengaruh terhadap efektifitas laporan keuangan suatu pemerintah dalam meraih opini WTP karena jaman sekarang yang dibutuhkan adalah kemampuan ITEnya dalam kecepatan mengelola data yang transparansi (terbuka).

Penjelasan Bapak Arifuddin diatas diperkuat dengan penjelasan bapak Irwan selaku Kasubid Pelaporan, mengatakan bahwa :

“Opini itu menggambarkan kinerja laporan keuangan jika opininya bagus maka laporan keuangan juga tentunya disajikan secara wajar tapi tidak menutup kemungkinan ada persoalan-persoalan dibidang keuangan yang tidak tersentuh oleh BPK RI, Laporan keuangan dengan menggunakan basis akrual harus didukung oleh SDM yang memadai jadi jika dikatakan apakah kemampuan SDM berpengaruh pada opini audit ? maka jawabannya jelas sangat berpengaruh ”

Dari hasil wawancara dengan beberapa responden peneliti dapat menyimpulkan bahwa ada beberapa upaya yang dilakukan pemerintah daerah kabupaten sidrap yang menjadi tolak ukur penilaian oleh BPK RI dalam memberikan opini WTP pada pemerintah daerah kabupaten sidrap dengan cara membenahi seluruh aspek yang menjadi temuan dan catatan kaki oleh BPK RI dari tahun-tahun pemeriksaan sebelumnya yaitu:

1. Good Government
2. Menyajikan laporan keuangan tepat waktu
3. Membuat laporan keuangan secara transparansi
4. Laporan keuangan yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan
5. Meningkatkan kinerja sumber daya manusianya

Karena laporan keuangan menjadi salah satu tolak ukur diberikannya Opini oleh BPK yang menjadi acuan baik buruknya pengelolaan keuangan harus diyakini kewajaran dalam pemeriksaan yang bebas dan mandiri. untuk dapat meyakini Opini tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah kabupaten sidrap telah memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh BPK untuk dapat memperoleh predikat opini WTP .

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dari mulai bab pendahuluan sampai dengan pembahasan, maka pada bab ini penulis menarik kesimpulan mengenai upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten dalam meraih opini WTP pada pemerintah daerah Kabupaten. Penulis juga mengajukan beberapa saran sebagai hasil dari penelitian dan bahan pertimbangan bagi peneliti selanjutnya.

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang penulis uraikan sebagai berikut:

1. Bahwa laporan keuangan menjadi salah satu tolak ukur diberikannya opini oleh BPK yang menjadi acuan baik buruknya pengelolaan keuangan karena harus dapat diyakini kewajaran dalam pemeriksaan yang bebas dan mandiri. Untuk dapat meyakini Opini, pemeriksaan harus memenuhi kriteria penilaian kewajaran.
2. Kegiatan pemeriksaan oleh pihak interen pemerintah daerah sangat berperan penting dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan sebagai upaya menanggulangi penyimpangan. Temuan hasil pemeriksaan audit oleh BPK RI harus ditindaklanjuti dengan melakukan pembenahan atas catatan-catatan kaki dari BPK RI.
3. Bahwa upaya-upaya yang dilakukan pemerintah daerah kabupaten Sidrap pada instansi BPKD sangatlah penting dan berpengaruh signifikan baik sebelum mendapat opini WTP maupun sesudah mendapat opini WTP.

Upaya sebelum mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yaitu dengan membenahi seluruh aspek yang menjadi temuan dan catatan kaki oleh BPK-RI dari tahun-tahun pemeriksaan sebelumnya. Beberapa aspek yang dibenahi yaitu Sumber daya manusia, kedisiplinan/tepat waktu dalam membuat laporan keuangan, semua yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dijelaskan dengan rinci dan dapat dimengerti. Adapun Upaya sesudah mendapat opini WTP yaitu dengan mempertahankan opini tersebut dengan cara membenahi segala aspek yang menjadi temuan atau catatan-catatan kecil oleh BPK-RI.

B. Saran

Dari hasil kesimpulan, penulis memberikan saran yang kiranya dapat bermanfaat dan menjadi cerminan untuk penelitian selanjutnya mengenai Upaya-upaya pemerintah dalam meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) pada pemerintah daerah kabupaten Sidrap. Saran yang dikemukakan sebagai berikut:

1. Saran bagi Badan Pengelola Keuangan daerah

Efektivitas pengelolaan keuangan daerah perlu dilakukan oleh pengawasan yang memadai, serta dalam pemeriksaan harus ada komunikasi antara pimpinan dengan objek yang diperiksa.

2. Saran bagi Pemerintah Daerah

Kegiatan pemeriksaan oleh pihak interen harus lebih intensif dan ditingkatkan lagi sebagai upaya menanggulangi penyimpangan. Temuan

hasil pemeriksaan oleh BPK RI harus ditindaklanjuti dengan melakukan pembenahan atas catatan-catatan kaki dari BPK RI.

3. Saran bagi peneliti selanjutnya

Peneliti selanjutnya yang akan meneliti masalah upaya-upaya pemerintah dalam meraih opini Wjar Tanpa Pengecualian (WTP) agar memperbanyak jumlah responden lebih dari jumlah responden yang diteliti oleh penulis, supaya hasil penelitian dapat lebih variatif artinya kemungkinan hasil penelitian tersebut dapat berperan atau tidak dapat berperan.

DAFTAR PUSTAKA

- _____. 2012. *Auditing: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik*. Salemba Empat: Jakarta.
- Adrian Sutedi. 2012. *Hukum Keuangan Negara*. PT. Citra AdityaBakti: Bandung.
- Af, A.R. 2015. *Barometer Keuangan Negara/Daerah*. Cv.Andi: Yogyakarta.
- Agoes Sutrisno, 2016. *Auditing Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan Oleh Kantor Akuntan Publik*. Salemba Empat: Jakarta.
- Agoes, S. 2011. *Auditing Edisi 4*. Salemba Empat: Jakarta.
- Arif, Bachtiar et at. 2009. *Akuntansi Pemerintah*. PT INDEKS: Jakarta.
- Bratakusumah,D.S dan Solihin Dadang. 2004. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Gramedia: Jakarta
- Darmawan Wawan. 2017. Pemaknaan Proses Menuju Opini WTP: Sebuah Etnometodologi di Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. *Journal of Applied Accounting and Taxation*, Vol. 8, No. 2. (diakses 25 November).
- Effendy Yuswar. 2011. Kajian Hasil Pemeriksaan Bpk Opini Wajar Tanpa Pengecualian (Wtp) Terhadap Laporan Keuangan Pemda.*Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Vol . 11, No 1. (diakses 22 November)*.
- Emzir. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*. Jakarta:Rajawali Pers.
- Fatimah desi, Sari.R, dan Rasuli, M. 2014. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan, Opini Audit Tahun Sebelumnya Dan Umur Pemerintah Daerah Terhadap Penerimaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian Pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Seluruh Indonesia. *Jurnal Akuntansi*, Vol. 3, No. 1. (diakses 21 November).
- Haryadi, Kamaliah dan Ratnawati. 2015. Analisis Pengungkapan (Disclosure) Laporan Keuangan Kabupaten Yang Meraih Opini Audit Wajar Tanpa Pengecualian (Wtp) Dua Tahun Berturut-Turut.*Jurnal Telaah dan Riset Akuntansi* ,(online) Vol. 3. (diakses 20 November 2017).
- Hery. 2016. *Analisis Laporan Keuangan*. Grasindo: Jakarta.
- https://id.m.wikipedia.org/wiki/sumber_daya_manusia

- Ihwand. L. 2014. Analisis Terhadap Opini Bpk Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Politik Pemerintahan*, Vol. 9, No. 1. (diakses 21 November).
- Karianga, Hendra. 2017. *Carut-Marut Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi Daerah Perspektif Hukum dan Politik*. Kencana: Depok.
- L.M. Samryn, 2014, *Pengantar Akuntansi*, Jakarta, Rajawali Pers., Hlm 34
- Marjulin. 2012. Analisa Pengungkapan Laporan Keuangan Kota Banda Aceh Dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian. *Jurnal akuntansi* (online) Vol. 1, No. 1. (diakses 20 November 2017).
- Muhammad Djafar Saidi. 2014. *Hukum Keuangan Negara*. Rajawali Pers: Jakarta.
- Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan (SAP)
- Rai, I.G.A. 2008. *Audit Kinerja Pada Sektor Publik*. Salemba Empat: Jakarta.
- Sanusi, 2011. *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*: Alfabeta: Bandung
- Sary., D.N. 2014. Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Dalam Pengelolaan Keuangan Tahun 2011-2012. *Jom Fisip* Volume 1 No. 2 Oktober 2014.
- Sugiyono, 2009. *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*: Alfabeta: Bandung
- Sulistiyowati, L. 2010. *Panduan Praktis Memahami Laporan Keuangan*. Pt Elex Media Komputindo: Jakarta.
- Sutrisno Edy, 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Kencana: Jakarta.
- Umar, dan Husein. 2008. *Desain Penelitian Akuntansi Keperilakuan*. Rajawali: Jakarta.
- Wibowo, dan A. Abubakar. 2009. *Akuntansi Keuangan Dasar 2*. Grasindo: Jakarta.

**L
A
M
P
I
R
A
N**



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
JL. HARAPAN BARU KOMPLEKS SKPD BLOK A NO. 5 KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN
Telepon (0421) - 3590005 Email : ptsp_sidrap@yahoo.co.id Kode Pos : 91611

IZIN PENELITIAN

Nomor : 307/IP/DPMPTSP/4/2018

- DASAR**
1. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang No. 1 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang
 2. Surat Permohonan **JUMARIAH** Tanggal **27-04-2018**
 3. Berita Acara Telaah Administrasi / Telaah Lapangan dari Tim Teknis **BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KAB. SIDRAP** Nomor **800/323/Kesbangpol/2018** Tanggal **26-04-2018**

MENGIZINKAN

KEPADA

NAMA : JUMARIAH

ALAMAT : DUSUN LEPPANGENG, DESA LEPPANGENG, KEC. PITU RIASE

UNTUK : melaksanakan Penelitian dalam Kabupaten Sidenreng Rappang dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : " UPAYA PEMERINTAH DAERAH DALAM MENCAPAI OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN (WTP) PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG (STUDI KASUS BADAN PENGELOLAH KEUANGAN DAERAH (BPKD)) "

LOKASI PENELITIAN : BADAN PENGELOLAH KEUANGAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

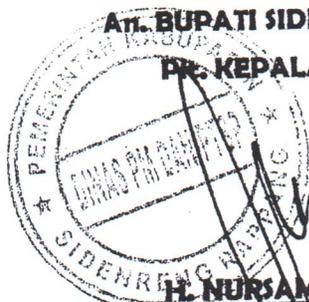
JENIS PENELITIAN : WAWANCARA MENDALAM

LAMA PENELITIAN : 02 Mei 2018 s.d 02 Juli 2018

Izin Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung

Dikeluarkan di : Pangkajene Sidenreng
Pada Tanggal : 27-04-2018

At. BUPATI SIDENRENG RAPPANG
DR. KEPALA DINAS,



H. NURSAMAN, SE

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19580202 198702 1 005

Biaya : Rp. 0,00

Tembusan :

- Ka. BPKD Kab. Sidrap
- Ketua LP3M UNISMUH Makassar
- Peringgal

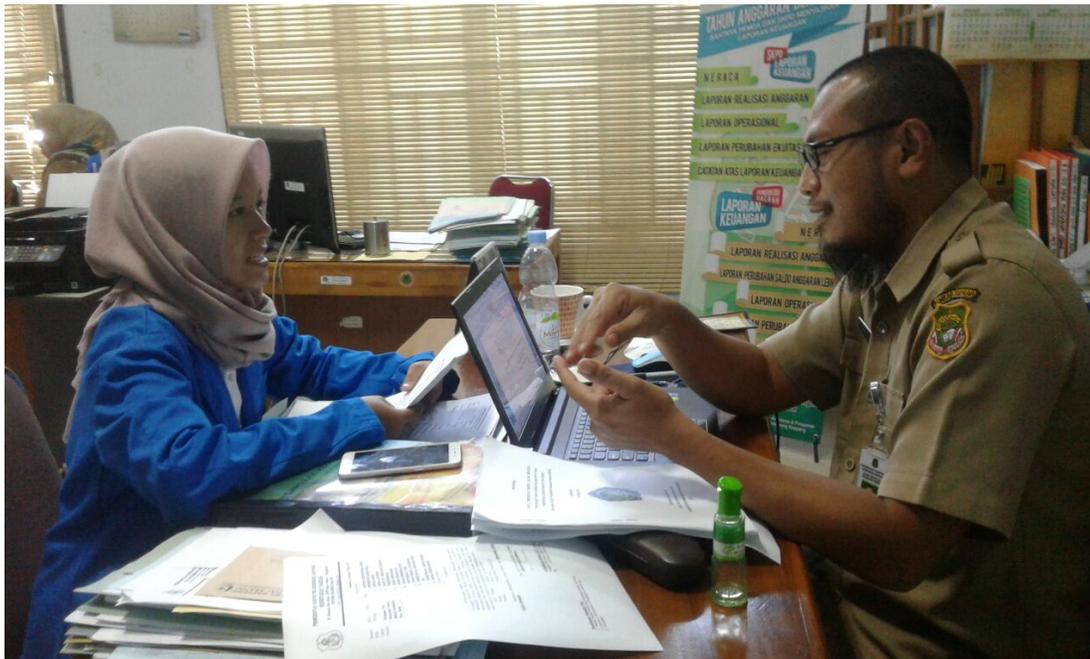
Format Pertanyaan Wawancara

Pertanyaan :

1. Apakah opini terhadap laporan keuangan daerah sidrap penting? mengapa?
2. Bagaimana gambaran opini laporan keuangan kab sidrap dari tahun ke tahun? apa faktor-faktor yang menyebabkan demikian
3. Apakah opini yang diperoleh untuk laporan keuangan kab sidrap tahun ini? Strategi apa yang di terapkan sehingga dapat diperoleh opini tersebut?
4. Aspek apa saja yang turut dibenahi agar terus memperoleh opini laporan keuangan yang baik dimasa akan datang
5. Apakah pengaruhnya opini laporan keuangan kab sidrap bila di tinjau dari Peningkatan kemampuan SDM ?

Dokumentasi





Lampiran III : PERATURAN DAERAH
 Nomor : 09 Tgl 26 Juli 2016
 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
 APBD TA. 2015



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
LAPORAN ARUS KAS

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2015 dan 2014

(Audited)

(Dalam Rupiah)

URAIAN	2015	2014
Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
<i>Arus Kas Masuk</i>		
Pendapatan Pajak Daerah	21,125,803,135.00	16,679,705,196.00
Pendapatan Retribusi Daerah	15,666,303,179.55	26,791,481,122.20
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	4,538,586,580.12	3,885,895,413.00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	8,033,600,835.97	10,877,978,928.60
Dana Bagi Hasil Pajak	17,992,461,750.00	20,579,510,096.00
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	2,234,894,034.00	3,330,537,748.00
Dana Alokasi Umum	574,364,767,000.00	533,655,220,000.00
Dana Alokasi Khusus	178,153,990,000.00	51,755,940,000.00
Dana Penyesuaian	138,187,381,000.00	95,364,599,000.00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	35,375,722,446.00	37,397,840,875.41
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	9,848,756,807.02	0.00
Pendapatan Hibah	16,047,848,000.00	0.00
Pendapatan Lainnya	16,594,601,600.00	14,168,713,880.00
Jumlah Arus Kas Masuk	1,038,164,716,367.66	814,487,422,259.21
<i>Arus Kas Keluar</i>		
Belanja Pegawai	516,493,906,895.14	478,155,307,085.00
Belanja Barang	120,277,389,664.78	113,716,550,080.00
Belanja Bunga	2,019,927,327.00	2,207,839,516.00
Belanja Hibah	17,886,031,732.00	3,923,433,713.00
Belanja Bantuan Sosial	0.00	836,659,755.00
Belanja Bantuan Keuangan	727,631,532.00	14,852,459,751.00
Belanja Tak Terduga	344,650,000.00	4,004,177,427.00
Bagi Hasil Pajak	0.00	363,732,000.00
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	33,531,973,400.00	0.00
Jumlah Arus Kas Keluar	691,281,510,550.92	618,060,159,327.00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	346,883,205,816.74	196,427,262,932.21
Arus Kas dari Aktivitas Investasi /Investasi Aset Non Keuangan		
<i>Arus Kas Masuk</i>		
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua	122,687,520.00	0.00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat	350,641,700.00	0.00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - Penjualan Hasil Pertanian	2,500,000.00	0.00
Jumlah Arus Kas Masuk	475,829,220.00	0.00
<i>Arus Kas Keluar</i>		
Belanja Tanah	182,000,000.00	3,255,811,380.00
Belanja Peralatan dan Mesin	19,453,354,439.00	25,107,300,487.00
Belanja Bangunan dan Gedung	62,161,321,037.00	45,068,412,527.00
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	242,218,512,798.00	115,218,286,279.00
Belanja Aset Tetap Lainnya	1,099,947,000.00	28,191,100.00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	1,000,000,000.00	0.00
Jumlah Arus Kas Keluar	326,115,135,274.00	188,678,001,773.00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi / Investasi Aset Non Keuangan	(325,639,306,054.00)	(188,678,001,773.00)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan/ Pembiayaan		
<i>Arus Kas Masuk</i>		
Pinjaman Dalam Negeri	0.00	0.00
Jumlah Arus Kas Masuk	0.00	0.00
<i>Arus Kas Keluar</i>		
Pembayaran Pokok Utang	2,274,086,499.00	2,274,086,500.00
Jumlah Arus Kas Keluar	2,274,086,499.00	2,274,086,500.00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan/ Pembiayaan	(2,274,086,499.00)	(2,274,086,500.00)
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris/ Non Anggaran		
<i>Arus Kas Masuk</i>		
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	43,349,400,184.00	37,097,356,210.00
Saldo Sisa UP TA 2014	0.00	13,212,690.00
Jumlah Arus Kas Masuk	43,349,400,184.00	37,110,568,900.00
<i>Arus Kas Keluar</i>		
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	43,349,400,184.00	37,097,356,210.00
Jumlah Arus Kas Keluar	43,349,400,184.00	37,097,356,210.00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris/ Non Anggaran	0.00	13,212,690.00
Kenaikan / (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode	18,969,813,263.74	5,488,387,349.21
Saldo Awal Kas di BUD dan Kas di Bendahara Pengeluaran	6,600,186,005.69	1,111,798,656.48
Saldo Akhir Kas di BUD dan Kas di Bendahara Pengeluaran	25,569,999,269.43	6,600,186,005.69
Kas Di Bendahara Penerimaan	300,000.00	700,000.00
Kas di Bendahara Dana Kapitasi JKN	824,084,416.00	463,588,654.00
Kas Lainnya	0.00	0.00
Kas Dana BOS	525,585,834.00	0.00
Kas Dana Non Kapitasi JKN	2,567,887,479.00	0.00
Saldo Akhir Kas	29,487,856,998.43	7,064,474,659.69

Pangkajene Sidenreng, 26 Juli 2016
BUPATI SIDENRENG RAPPANG

H. RUSDI MASSE



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DECEMBER 2015 DAN 2014

NO. URUT	URAIAN	SALDO 2015	SALDO 2014	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
8	PENDAPATAN - LO	120,040,640,443.87	0.00	120,040,640,443.87	0.00
8.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO	20,122,711,308.87	0.00	20,122,711,308.87	0.00
8.1.1	Pendapatan Pajak Daerah - LO	10,984,103,134.00	0.00	10,984,103,134.00	0.00
8.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah - LO	4,881,854,592.00	0.00	4,881,854,592.00	0.00
8.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	0.00	0.00	0.00	0.00
8.1.4	Lain-lain PAD Yang Sah - LO	4,256,753,582.87	0.00	4,256,753,582.87	0.00
8.2	PENDAPATAN TRANSFER - LO	99,917,929,135.00	0.00	99,917,929,135.00	0.00
8.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO	60,284,782,135.00	0.00	60,284,782,135.00	0.00
8.2.2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO	39,633,147,000.00	0.00	39,633,147,000.00	0.00
8.2.3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO	0.00	0.00	0.00	0.00
8.2.4	Bantuan Keuangan - LO	0.00	0.00	0.00	0.00
8.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO	0.00	0.00	0.00	0.00
8.3.1	Pendapatan Hibah - LO	0.00	0.00	0.00	0.00
8.3.2	Dana Darurat - LO	0.00	0.00	0.00	0.00
8.3.3	Pendapatan Lainnya - LO	0.00	0.00	0.00	0.00
8.4	SURPLUS NON OPERASIONAL - LO	0.00	0.00	0.00	0.00
8.4.1	Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO	0.00	0.00	0.00	0.00
8.4.2	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	0.00	0.00	0.00	0.00
8.4.3	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	0.00	0.00	0.00	0.00
8.5	PENDAPATAN LUAR BIASA - LO	0.00	0.00	0.00	0.00
8.5.1	Pendapatan Luar Biasa - LO	0.00	0.00	0.00	0.00
9	BEBAN	19,542,837,206.00	0.00	19,542,837,206.00	0.00
9.1	BEBAN OPERASI	19,542,837,206.00	0.00	19,542,837,206.00	0.00
9.1.1	Beban Pegawai - LO	14,937,120,885.00	0.00	14,937,120,885.00	0.00
9.1.2	Beban Barang dan Jasa	4,605,716,321.00	0.00	4,605,716,321.00	0.00
9.1.3	Beban Bunga	0.00	0.00	0.00	0.00
9.1.4	Beban Subsidi	0.00	0.00	0.00	0.00
9.1.5	Beban Hibah	0.00	0.00	0.00	0.00
9.1.6	Beban Bantuan Sosial	0.00	0.00	0.00	0.00
9.1.7	Beban Penyusutan dan Amortisasi	0.00	0.00	0.00	0.00
9.1.8	Beban Penyisihan Piutang	0.00	0.00	0.00	0.00
9.1.9	Beban Lain-lain	0.00	0.00	0.00	0.00
9.2	BEBAN TRANSFER	0.00	0.00	0.00	0.00
9.2.1	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00
9.2.2	Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00
9.2.3	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00
9.2.4	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	0.00	0.00	0.00	0.00
9.2.5	Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00
9.2.6	Beban Transfer Dana Otonomi Khusus	0.00	0.00	0.00	0.00
9.3	DEFISIT NON OPERASIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
9.3.1	Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO	0.00	0.00	0.00	0.00
9.3.2	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	0.00	0.00	0.00	0.00
9.3.3	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	0.00	0.00	0.00	0.00
9.4	BEBAN LUAR BIASA	0.00	0.00	0.00	0.00
9.4.1	Beban Luar Biasa	0.00	0.00	0.00	0.00
	SURPLUS/DEFISIT-LO	100,497,803,237.87	0.00	100,497,803,237.87	0.00

Pangkajene Sidenreng, 31 Desember 2015

BUPATI**H. RUSDI MASSE**



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2015 DAN 2014

(Dalam Rupiah)

URAIAN	2015	2014
1 EKUITAS AWAL	2,160,064,707,314.53	0.00
2 SURPLUS/DEFISIT-LO	247,021,942,324.49	0.00
3 DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:	(619,815,192,085.89)	
4 Koreksi Nilai Persediaan	318,773,011.00	0.00
5 Selisih Revaluasi Aset Tetap	23,253,865,361.61	0.00
6 Koreksi ekuitas lainnya	(643,387,830,458.50)	0.00
7 EKUITAS AKHIR	1,787,271,457,553.13	0.00

Pangkajene Sidenreng, 26 Juli 2016

BUPATI

H. RUSDI MASSE



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2016 DAN 2015

(Dalam Rupiah)

URAIAN	2016	2015
1 EKUITAS AWAL	1,787,271,457,553.13	2,160,064,707,314.53
2 SURPLUS/DEFISIT-LO	212,331,964,198.84	247,021,942,324.49
3 DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:	153,353,858,686.96	(619,815,192,085.89)
4 Koreksi Nilai Persediaan	(9,383,900.00)	318,773,011.00
5 Selisih Revaluasi Aset Tetap	0.00	23,253,865,361.61
6 Koreksi ekuitas lainnya	153,363,242,586.96	(643,387,830,458.50)
7 EKUITAS AKHIR	2,152,957,280,438.93	1,787,271,457,553.13

Pangkajene Sidenreng, 26 Mei 2017

BUPATI

H. RUSDI MASSE



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2016 DAN 2015

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2016	2015	2014
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	28,953,661,865.43	7,063,774,659.69	1,125,011,346.48
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	28,953,661,865.43	11,849,155,333.69	1,125,011,346.48
3	Sub Total (1-2)	0.00	(4,785,380,674.00)	0.00
4	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	8,045,376,868.35	28,953,661,865.43	7,063,774,659.69
5	Sub Total (3-4)	8,045,376,868.35	24,168,281,191.43	7,063,774,659.69
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	0.00	4,785,380,674.00	0.00
7	Lain-lain	0.00	0.00	0.00
8	Saldo Anggaran Lebih Akhir (5+6+7)	8,045,376,868.35	28,953,661,865.43	7,063,774,659.69

Pangkajene Sidenreng, 26 Mei 2017

BUPATI**H. RUSDI MASSE**

PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2016 DAN 2015

(Dalam Rupiah)

	URAIAN	2016	2015
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	28,953,661,865.43	7,063,774,659.69
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	28,953,661,865.43	11,849,155,333.69
3	Sub Total (1-2)	0.00	(4,785,380,674.00)
4	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	8,045,376,868.35	28,953,661,865.43
5	Sub Total (3-4)	8,045,376,868.35	24,168,281,191.43
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	0.00	4,785,380,674.00
7	Lain-lain	0.00	0.00
8	Saldo Anggaran Lebih Akhir (5+6+7)	8,045,376,868.35	28,953,661,865.43

Pangkajene Sidenreng, 26 Mei 2017

BUPATI**H. RUSDI MASSE**



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2016 DAN 2015

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2016	2015	2014
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	28,953,661,865.43	7,063,774,659.69	1,125,011,346.48
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	28,953,661,865.43	11,849,155,333.69	1,125,011,346.48
3	Sub Total (1-2)	0.00	(4,785,380,674.00)	0.00
4	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	8,045,376,868.35	28,953,661,865.43	7,063,774,659.69
5	Sub Total (3-4)	8,045,376,868.35	24,168,281,191.43	7,063,774,659.69
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	0.00	4,785,380,674.00	0.00
7	Lain-lain	0.00	0.00	0.00
8	Saldo Anggaran Lebih Akhir (5+6+7)	8,045,376,868.35	28,953,661,865.43	7,063,774,659.69

Pangkajene Sidenreng, 26 Mei 2017

BUPATI

H. RUSDI MASSE



NERACA
PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Per 31 December 2015 dan 2014

(Dalam Rupiah)

URAIAN		REF	2015	2014
ASET		7.4.3.1		
ASET LANCAR		7.4.3.1.A		
	Kas di Kas Daerah	7.4.3.1.A.1	25,545,199,269.43	6,586,853,005.69
	Kas di Bendahara Penerimaan	7.4.3.1.A.3	300,000.00	700,000.00
	Kas di Bendahara Pengeluaran	7.4.3.1.A.2	37,296,789.00	19,735,193.00
	Kas di BLUD		0.00	0.00
	Kas Lainnya	7.4.3.1.A.5	3,093,473,313.00	0.00
	Setara Kas		0.00	0.00
	Kas di Bendahara Dana Kapitasi JKN	7.4.3.1.A.4	824,084,416.00	463,588,654.00
	Investasi Jangka Pendek		0.00	0.00
	Piutang Pajak	7.4.3.1.A.6	4,144,075,250.00	2,442,684,510.00
	Penyisihan Piutang Pajak	7.4.3.1.A.7	(801,357,829.92)	0.00
	Piutang Pajak Netto		3,342,717,420.08	0.00
	Piutang Retribusi	7.4.3.1.A.8	950,870,498.00	695,678,073.00
	Penyisihan Piutang Retribusi	7.4.3.1.A.9	(518,909,680.38)	0.00
	Piutang Retribusi Netto		431,960,817.62	0.00
	Piutang Lainnya	7.4.3.1.A.10	1,880,683,784.50	963,397,747.50
	Penyisihan Piutang Lainnya	7.4.3.1.A.11	(847,521,856.98)	0.00
	Piutang Lainnya Netto		1,033,161,927.52	0.00
	Penyisihan Piutang	7.4.3.1.A.12	0.00	(1,348,186,051.50)
	Persediaan	7.4.3.1.A.13	9,020,860,040.00	6,630,598,634.00
JUMLAH ASET LANCAR			43,329,053,992.65	16,455,049,765.69
INVESTASI JANGKA PANJANG		7.4.3.1.B		
	Investasi Jangka Panjang Non Permanen			
	Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya		0.00	0.00
	Investasi dalam Obligasi		0.00	0.00
	Investasi dalam Proyek Pembangunan		0.00	0.00
	Dana Bergulir		0.00	0.00
	Deposito Jangka Panjang		0.00	0.00
	Investasi Non Permanen Lainnya	7.4.3.1.B.1	4,753,361,301.00	5,001,376,988.00
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Non Permanen			4,753,361,301.00	5,001,376,988.00
	Investasi Jangka Panjang Permanen			
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	7.4.3.1.B.3	32,497,573,997.72	33,455,536,380.72
	Investasi Permanen Lainnya		0.00	0.00
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen			32,497,573,997.72	33,455,536,380.72
	Penyisihan Dana Bergulir tidak dapat ditagih			
	Penyisihan Dana Bergulir tidak dapat ditagih	7.4.3.1.B.2	(4,753,361,301.00)	(5,001,376,988.00)
JUMLAH Penyisihan Dana Bergulir tidak dapat ditagih			(4,753,361,301.00)	(5,001,376,988.00)
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG			32,497,573,997.72	33,455,536,380.72
ASET TETAP		7.4.3.1.C		
	Tanah	7.4.3.1.C.1	420,635,697,612.21	407,887,624,335.00
	Peralatan dan Mesin	7.4.3.1.C.2	203,126,767,819.96	237,803,611,689.54
	Gedung dan Bangunan	7.4.3.1.C.3	630,715,611,448.49	558,105,024,952.00
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	7.4.3.1.C.4	1,106,994,266,602.44	827,928,604,909.60
	Aset Tetap Lainnya	7.4.3.1.C.5	90,301,116,612.90	19,219,900,628.00
	Konstruksi Dalam Pengerjaan	7.4.3.1.C.6	91,554,608,581.24	137,445,740,920.85
	Akumulasi Penyusutan	7.4.3.1.C.7	(702,438,162,255.00)	0.00
JUMLAH ASET TETAP			1,840,889,906,422.24	2,188,390,507,434.99
DANA CADANGAN		7.4.3.1.D		
	Dana Cadangan	7.4.3.1.D.1	0.00	0.00

	JUMLAH DANA CADANGAN		0.00	0.00
	ASET LAINNYA	7.4.3.1.E		
	Tagihan Jangka Panjang	7.4.3.1.E.1	0.00	0.00
	Penyisihan Tagihan Penjualan Angsuran			
	Tagihan Penjualan Angsuran Netto			
	Tuntutan Ganti Rugi	7.4.3.1.E.2		
	Penyisihan Tuntutan Ganti Rugi			
	Tuntutan Ganti Rugi Netto			
	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	7.4.3.1.E.3	0.00	0.00
	Aset Tidak Berwujud	7.4.3.1.E.4	260,250,000.00	183,250,000.00
	Amortisasi Aset Tidak Berwujud	7.4.3.1.E.5	(67,925,000.00)	
	Aset Tidak Berwujud Netto		192,325,000.00	
	Aset Lain-lain	7.4.3.1.E.6	28,599,014,901.00	23,038,487,056.46
	JUMLAH ASET LAINNYA		28,791,339,901.00	23,221,737,056.46
	JUMLAH ASET		1,945,507,874,313.61	2,261,522,830,637.86
	KEWAJIBAN	7.4.3.2		
	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	7.4.3.2.A		
	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	7.4.3.2.A.1	20,806,088.00	6,402,193.00
	Utang Bunga		0.00	0.00
	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	7.4.3.2.A.2	3,422,341,503.60	3,422,341,500.93
	Pendapatan Diterima Dimuka	7.4.3.2.A.3	587,436,064.67	0.00
	Utang Beban	7.4.3.2.A.4	10,476,729,046.00	0.00
	Utang Jangka Pendek Lainnya	7.4.3.2.A.5	115,297,533,499.81	67,323,722,567.40
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		129,804,846,202.08	70,752,466,261.33
	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	7.4.3.2.B		
	Utang Dalam Negeri	7.4.3.2.B.1	20,466,778,532.40	22,740,865,036.00
	Utang Dalam Negeri- Non Perbankan	7.4.3.2.B.2	7,964,792,026.00	7,964,792,026.00
	Utang Jangka Panjang Lainnya		0.00	0.00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		28,431,570,558.40	30,705,657,062.00
	JUMLAH KEWAJIBAN		158,236,416,760.48	101,458,123,323.33
	EKUITAS			
	EKUITAS DANA LANCAR		0.00	0.00
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)		0.00	7,063,774,659.69
	Cadangan untuk Piutang		0.00	2,753,574,279.00
	Cadangan untuk Persediaan		0.00	6,630,598,634.00
	Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Pendek		0.00	(70,746,064,068.33)
	Pendapatan yang Ditangguhkan		0.00	700,000.00
	JUMLAH EKUITAS DANA LANCAR		0.00	(54,297,416,495.64)
	EKUITAS DANA INVESTASI		0.00	
	Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang		0.00	33,455,536,380.72
	Diinvestasikan dalam Aset Tetap		0.00	2,188,390,507,434.99
	Diinvestasikan dalam Aset Lainnya (tidak termasuk Dana Cadangan)		0.00	23,221,737,056.46
	Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Panjang		0.00	(30,705,657,062.00)
	JUMLAH EKUITAS DANA INVESTASI		0.00	2,214,362,123,810.17
	EKUITAS DANA CADANGAN		0.00	
	Diinvestasikan dalam Dana Cadangan		0.00	0.00
	JUMLAH EKUITAS DANA CADANGAN		0.00	0.00
	JUMLAH EKUITAS / EKUITAS DANA		0.00	2,160,064,707,314.53
	JUMLAH EKUITAS	7.4.3.3	1,787,271,457,553.13	
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA		1,945,507,874,313.61	2,261,522,830,637.86



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2016 DAN 2015

AUDITED

NO	URAIAN	REF	ANGGARAN 2016	REALISASI 2016	(%)	REALISASI 2015
1	PENDAPATAN - LRA (2+7+18)	7.5.1	1,607,408,280,000.00	1,184,966,741,717.92	73.72	1,064,876,798,940.66
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA (3 s.d 6)	7.5.1.1.a	132,582,303,650.00	98,400,923,153.52	74.22	76,076,376,303.64
3	Pendapatan Pajak Daerah - LRA	7.5.1.1.a.1)	29,754,256,878.00	21,806,810,527.00	73.29	21,125,803,135.00
4	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	7.5.1.1.a.2)	34,457,020,000.00	28,598,806,071.00	83.00	34,549,479,482.55
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA	7.5.1.1.a.3)	5,738,586,000.00	5,051,864,996.00	88.03	4,538,586,580.12
6	Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	7.5.1.1.a.4)	62,632,440,772.00	42,943,441,559.52	68.56	15,862,507,105.97
7	PENDAPATAN TRANSFER - LRA (8+13+15)	7.5.1.1.b	1,397,956,018,000.00	1,073,977,803,372.40	76.82	956,157,973,037.02
8	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA (9 s.d 12)	7.5.1.1.b.1)	1,140,579,906,000.00	974,121,056,622.00	85.41	772,746,112,784.00
9	Bagi Hasil Pajak - LRA	7.5.1.1.b.1)	54,623,186,000.00	17,108,242,897.00	31.32	17,992,461,750.00
10	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LRA	7.5.1.1.b.2)	11,768,758,000.00	7,532,389,437.00	64.00	2,234,894,034.00
11	Dana Abokasi Umum (DAU) - LRA	7.5.1.1.b.3)	618,402,978,000.00	618,402,978,000.00	100.00	574,364,767,000.00
12	Dana Abokasi Khusus (DAK) - LRA	7.5.1.1.b.4)	455,784,984,000.00	331,077,446,288.00	72.64	178,153,990,000.00
13	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA		189,042,832,000.00	48,814,223,000.00	25.82	138,187,381,000.00
14	Dana Penyesuaian - LRA	7.5.1.1.b.5)	189,042,832,000.00	48,814,223,000.00	25.82	138,187,381,000.00
15	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA (16 s.d 17)		68,333,280,000.00	51,042,523,750.40	74.70	45,224,479,253.02
16	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA	7.5.1.1.b.6)	68,333,280,000.00	51,041,832,550.00	74.70	35,375,722,446.00
17	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya - LRA	7.5.1.1.b.7)	0.00	691,200.00	0.00	9,848,756,807.02
18	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA (19 s.d 20)		76,869,958,350.00	12,588,015,192.00	16.38	32,642,449,600.00
19	Pendapatan Hibah - LRA		2,701,244,350.00	2,701,244,350.00	100.00	16,047,848,000.00
20	Pendapatan Lainnya - LRA		74,168,714,000.00	9,886,770,842.00	13.33	16,594,601,600.00
21	BELANJA (22+27+33+33)	7.5.1.2	1,570,211,979,000.00	1,144,563,801,765.00	72.89	1,010,238,600,977.92
22	BELANJA OPERASI	7.5.1.2.a	898,499,132,000.00	723,763,642,615.00	80.55	682,921,223,377.92
23	Belanja Pegawai	7.5.1.2.a.1)	562,141,984,000.00	527,121,084,627.00	86.61	477,110,529,691.00
24	Belanja Barang dan Jasa	7.5.1.2.a.2)	300,104,738,100.00	190,734,473,461.00	70.70	185,904,734,627.92
25	Belanja Bunga	7.5.1.2.a.3)	2,654,000,000.00	1,861,284,527.00	70.13	2,019,927,327.00
26	Belanja Hibah	7.5.1.2.a.4)	33,598,409,900.00	4,046,800,000.00	68.11	17,886,031,732.00
27	BELANJA MODAL	7.5.1.2.b	666,712,847,000.00	419,727,359,700.00	62.95	326,972,727,600.00
28	Belanja Modal Tanah	7.5.1.2.b.1)	998,471,000.00	131,250,000.00	13.15	182,000,000.00
29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.5.1.2.b.2)	52,817,609,500.00	30,994,898,301.00	58.68	21,109,480,365.00
30	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	7.5.1.2.b.3)	140,232,991,150.00	92,967,586,432.00	66.30	62,359,787,437.00
31	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	7.5.1.2.b.4)	470,992,575,350.00	294,300,614,267.00	62.49	242,218,512,798.00
32	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7.5.1.2.b.5)	1,671,200,000.00	1,333,010,700.00	79.76	1,102,947,000.00
33	BELANJA TAK TERDUGA	7.5.1.2.c	5,000,000,000.00	1,072,799,450.00	21.46	344,650,000.00
34	Belanja Tak Terduga		5,000,000,000.00	1,072,799,450.00	21.46	344,650,000.00
35	TRANSFER (36+38)	7.5.1.2.d	59,694,718,000.00	56,335,894,107.00	94.37	34,259,604,932.00
36	TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN		3,411,720,000.00	2,624,841,515.00	76.94	2,269,234,350.00
37	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah		3,411,720,000.00	2,624,841,515.00	76.94	2,269,234,350.00
38	TRANSFER BANTUAN KEUANGAN		56,282,998,000.00	53,711,052,592.00	95.43	31,990,370,582.00
39	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa		55,384,284,000.00	53,127,541,400.00	95.93	31,262,739,050.00
40	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya		898,714,000.00	583,511,192.00	64.93	727,631,532.00
41	SURPLUS / (DEFISIT) (1-21)	7.5.1.2.e	(22,498,417,000.00)	(15,932,954,154.08)	70.82	20,378,593,030.74
42	PEMBIAYAAN (43 + 45)	7.5.1.3				
43	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	7.5.1.3.a	28,953,661,865.00	28,953,661,865.43	100.00	11,849,155,333.69
44	Penggunaan SILPA		28,953,661,865.00	28,953,661,865.43	100.00	11,849,155,333.69
45	PENGELUARAN PEMBIAYAAN (46 + 47)	7.5.1.3.b	6,455,244,865.00	4,975,330,843.00	77.07	3,274,086,499.00
46	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah		3,701,244,350.00	2,701,244,350.00	72.98	1,000,000,000.00
47	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri		2,754,000,515.00	2,274,086,493.00	82.57	2,274,086,499.00
48	PEMBIAYAAN NETTO (43 - 45)		22,498,417,000.00	23,978,331,022.43	106.58	8,575,068,834.69
49	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) (41+48)	7.5.1.4	0.00	8,045,376,868.35	0.00	28,953,661,865.43

Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini.

Pangkajene Sidenreng, 26 Mei 2017

BUPATI

H. RUSDI MASSE

URAIAN		REF	2016	2015
1	Arus Kas dari Aktivitas Operasi	7.5.5.2		
2	<i>Arus Kas Masuk</i>			
3	Pendapatan Pajak Daerah		21,806,810,527.00	21,125,803,135.00
4	Pendapatan Retribusi Daerah		17,634,032,866.00	15,666,303,179.55
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		5,051,864,996.00	4,538,586,580.12
6	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		74,304,810,292.52	8,033,600,835.97
7	Dana Bagi Hasil Pajak		17,108,242,897.00	17,992,461,750.00
8	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)		7,532,389,437.00	2,234,894,034.00
9	Dana Alokasi Umum		618,402,978,000.00	574,364,767,000.00
10	Dana Alokasi Khusus		331,077,446,288.00	178,153,990,000.00
11	Dana Penyesuaian		50,720,487,500.00	138,187,381,000.00
12	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		49,136,259,250.40	35,375,722,446.00
13	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya		0.00	9,848,756,807.02
14	Pendapatan Hibah		0.00	16,047,848,000.00
15	Pendapatan Lainnya		9,886,770,842.00	16,594,601,600.00
16	Jumlah Arus Kas Masuk		1,202,662,092,895.92	1,038,164,716,367.66
17	<i>Arus Kas Keluar</i>			
18	Belanja Pegawai		489,142,566,095.00	516,493,906,895.14
19	Belanja Barang		228,234,617,480.00	120,277,389,664.78
20	Belanja Bunga		1,861,284,527.00	2,019,927,327.00
21	Belanja Hibah		22,884,924,765.00	17,886,031,732.00
22	Belanja Bantuan Sosial		0.00	0.00
23	Belanja Bantuan Keuangan		583,511,192.00	727,631,532.00
24	Belanja Tak Terduga		1,072,799,450.00	344,650,000.00
25	Bagi Hasil Pajak		0.00	0.00
26	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya		55,752,382,915.00	33,531,973,400.00
27	Jumlah Arus Kas Keluar		799,532,086,424.00	691,281,510,550.92
28	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		403,130,006,471.92	346,883,205,816.74
29	Arus Kas dari Aktivitas Investasi /Investasi Aset Non Keuangan	7.5.5.3		
30	<i>Arus Kas Masuk</i>			
31	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua		47,596,870.00	122,687,520.00
32	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat		0.00	350,641,700.00
33	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - Penjualan Hasil Pertanian		9,730,750.00	2,500,000.00
34	Jumlah Arus Kas Masuk		57,327,620.00	475,829,220.00
35	<i>Arus Kas Keluar</i>			
36	Belanja Tanah		131,250,000.00	182,000,000.00
37	Belanja Peralatan dan Mesin		30,994,898,301.00	19,453,354,439.00
38	Belanja Bangunan dan Gedung		92,967,586,432.00	62,161,321,037.00
39	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan		294,300,614,267.00	242,218,512,798.00
40	Belanja Aset Tetap Lainnya		43,521,000.00	1,099,947,000.00
41	Penyerataan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah		0.00	1,000,000,000.00
42	Jumlah Arus Kas Keluar		418,437,870,000.00	326,115,135,274.00
43	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi / Investasi Aset Non Keuangan		(418,380,542,380.00)	(325,639,306,054.00)
44	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan / Pembiayaan	7.5.5.4		
45	<i>Arus Kas Masuk</i>			
46	Pinjaman Dalam Negeri		-	-
47	Jumlah Arus Kas Masuk		-	-
48	<i>Arus Kas Keluar</i>			
49	Pembayaran Pokok Utang		2,274,086,493.00	2,274,086,499.00
50	Jumlah Arus Kas Keluar		2,274,086,493.00	2,274,086,499.00
51	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan / Pembiayaan		(2,274,086,493.00)	(2,274,086,499.00)
52	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran	7.5.5.5		
53	<i>Arus Kas Masuk</i>			
54	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Tahun 2016		40,854,293,891.00	43,349,400,184.00
55	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Tahun 2015		20,806,088.00	0.00
56	Jumlah Arus Kas Masuk		40,875,099,979.00	43,349,400,184.00
57	<i>Arus Kas Keluar</i>			
58	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Tahun 2016		40,855,977,788.00	43,349,400,184.00
59	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Tahun 2015		0.00	0.00
60	Jumlah Arus Kas Keluar		40,855,977,788.00	43,349,400,184.00
61	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran		19,122,191.00	0.00
62	Kenalkan / (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode (28 + 43 + 51 + 61)	7.5.5.6	(17,505,500,210.08)	18,969,813,263.74
63	Saldo Awal Kas di BUD dan Kas di Bendahara Pengeluaran	7.5.5.6	25,569,999,269.43	6,600,186,005.69
64	Saldo Akhir Kas di BUD dan Kas di Bendahara Pengeluaran (75 + 76)	7.5.5.6	8,064,499,059.35	25,569,999,269.43
65	Kas Di Bendahara Penerimaan	7.5.5.6	0.00	300,000.00
66	Kas Di Bendahara Dana Kapitasi JKN	7.5.5.6	0.00	824,084,416.00
67	Kas Lainnya	7.5.5.6	0.00	0.00
68	Kas Dana BOS	7.5.5.6	455,719,275.00	525,585,834.00
69	Kas Dana Non Kapitasi JKN	7.5.5.6	0.00	2,567,887,479.00
70	Saldo Akhir Kas	7.5.5.6	8,520,218,334.35	29,487,856,998.43
Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini.				
			Pangkajene Sidenreng, 26 Mei 2017	
			BUPATI	
			H. RUSDI MASSE	



PERMINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DECEMBER 2016 DAN 2015

(Dalam Rupiah)

NO. URUT	URAIAN	Ref.	SALDO 2016	SALDO 2015	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
§	PENDAPATAN - LO	7.5.4.1	1,247,280,809,940.78	1,113,383,501,416.66	133,897,308,524.12	0.00
8.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO	7.5.4.1.a	111,525,521,381.38	77,371,034,879.64	34,154,486,501.74	30.62
8.1.1	Pendapatan Pajak Daerah - LO	7.5.4.1.a.1)	23,520,744,051.50	22,181,752,015.00	1,338,992,036.50	5.69
8.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah - LO	7.5.4.1.a.2)	29,049,880,457.00	34,784,951,907.55	(5,735,071,450.55)	(19.74)
8.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	7.5.4.1.a.3)	5,051,864,996.00	4,538,586,580.12	513,278,415.88	10.16
8.1.4	Lain-lain PAD Yang Sah - LO	7.5.4.1.a.4)	53,903,031,876.88	15,865,744,376.97	38,037,287,499.91	70.57
8.2	PENDAPATAN TRANSFER - LO		1,073,977,803,372.40	956,157,973,037.02	117,819,830,335.38	0.00
8.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO		974,121,056,622.00	772,746,112,784.00	201,374,943,838.00	20.67
8.2.1.01	Bagi Hasil Pajak - LO		17,108,242,897.00	17,992,461,750.00	(884,218,853.00)	(5.17)
8.2.1.02	Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam - LO		7,532,389,437.00	2,234,894,034.00	5,297,495,403.00	70.33
8.2.1.03	Dana Alokasi Umum (DAU) - LO		618,402,978,000.00	574,364,767,000.00	44,038,211,000.00	7.12
8.2.1.04	Dana Alokasi Khusus (DAK) - LO		331,077,446,288.00	178,153,990,000.00	152,923,456,288.00	46.19
				0.00	0.00	0.00
8.2.2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO		48,814,223,000.00	138,187,381,000.00	(89,373,158,000.00)	(183.09)
8.2.2.03	Dana Penyesuaian - LO		48,814,223,000.00	138,187,381,000.00	(89,373,158,000.00)	(183.09)
8.2.3	Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi - LO		51,042,523,750.40	45,224,479,253.02	5,818,044,497.38	11.40
8.2.3.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LO		51,041,832,550.40	35,375,722,446.00	15,666,110,104.40	30.69
8.2.3.02	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya - LO		691,200.00	9,848,756,807.02	(9,848,065,607.02)	(1,424,778.01)
8.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO		61,777,485,187.00	79,854,493,500.00	(18,077,008,313.00)	(29.26)
8.3.1	Pendapatan Hibah - LO		51,890,714,345.00	63,259,891,900.00	(11,369,177,555.00)	(21.91)
8.3.2	Dana Darurat - LO		0.00	0.00	0.00	0.00
8.3.3	Pendapatan Lainnya - LO		9,886,770,842.00	16,594,601,600.00	(6,707,830,758.00)	(67.85)
8.4	SURPLUS NON OPERASIONAL - LO		0.00	0.00	0.00	0.00
8.4.1	Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO		0.00	0.00	0.00	0.00
8.4.2	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO		0.00	0.00	0.00	0.00
8.4.3	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO		0.00	0.00	0.00	0.00
8.5	PENDAPATAN LUAR BIASA - LO		0.00	0.00	0.00	0.00
8.5.1	Pendapatan Luar Biasa - LO		0.00	0.00	0.00	0.00
§	BEBAN		1,033,243,003,045.94	866,016,909,092.17	167,226,093,953.77	0.00
9.1	BEBAN OPERASI		1,033,243,003,045.94	866,016,909,092.17	167,226,093,953.77	0.00
9.1.1	Beban Pegawai - LO		507,987,850,945.00	484,238,027,243.00	23,749,823,702.00	4.68
9.1.2.01	Beban Persediaan - LO		40,757,589,982.00	27,345,497,575.09	13,412,092,406.91	32.91
9.1.2	Beban Jasa - LO		196,086,164,276.70	132,069,990,607.83	64,016,173,668.87	32.65
9.1.2.18	Beban Pemeliharaan - LO		14,772,833,253.00	10,670,593,181.00	4,102,240,072.00	27.77
9.1.2.15	Beban Perjalanan Dinas - LO		26,064,208,325.00	16,919,180,633.00	9,145,027,692.00	35.09
9.1.3	Beban Bunga		1,861,284,527.00	1,889,516,046.61	(28,231,519.61)	(1.52)
9.1.4	Beban Subsidi		0.00	0.00	0.00	0.00
9.1.5	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		26,107,037,035.00	21,612,066,972.00	4,494,970,063.00	17.22
9.1.6	Beban Bantuan Sosial		0.00	0.00	0.00	0.00
9.1.7	Beban Penyusutan dan Amortisasi		159,282,066,498.98	101,488,692,313.00	57,793,374,185.98	36.28
9.1.08	Beban Penyisihan		1,200,580,807.26	2,165,557,414.28	(964,976,607.02)	(80.38)
9.2.	Beban Transfer		59,025,760,452.00	34,259,604,932.00	24,766,155,520.00	41.96
9.1.9	Beban Lain-lain		97,626,944.00	33,358,182,174.36	(33,260,555,230.36)	(34,069.03)
	SURPLUS/DEFISIT OPERASIONAL-LO		214,037,806,894.84	247,366,592,324.49	(33,328,785,429.65)	0.00
9.3	SURPLUS/DEFISIT NON OPERASIONAL		(633,043,246.00)	0.00	(633,043,246.00)	0.00
	Surplus Penjualan Aset Non Lancar		0.00	0.00	0.00	0.00
	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		0.00	0.00	0.00	0.00
	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		13,186,709.00	0.00	13,186,709.00	100.00
9.3.1	Defisit Penjualan Aset Non Lancar		0.00	0.00	0.00	0.00
9.3.2	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		0.00	0.00	0.00	0.00
9.3.3	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		(646,229,955.00)	0.00	(646,229,955.00)	0.00
	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		213,404,763,648.84	247,366,592,324.49	(33,961,828,675.65)	0.00
	POS LUAR BIASA		(1,072,799,450.00)	(344,650,000.00)	(728,149,450.00)	0.00
	Pendapatan Luar Biasa		0.00	0.00	0.00	0.00
9.4.1	Beban Luar Biasa		1,072,799,450.00	344,650,000.00	728,149,450.00	67.87
9.3.3	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO		0.00	0.00	0.00	0.00
	BEBAN LUAR BIASA		0.00	0.00	0.00	0.00
	Beban Luar Biasa		0.00	0.00	0.00	0.00
	SURPLUS/DEFISIT-LO		212,331,964,198.84	247,021,942,324.49	(34,689,978,125.65)	0.00

Pangkajene Sidenreng, 26 Mei 2017

BUPATI

H. RUSDI MASSE

 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2016 DAN 2015				
audited				
(Dalam Rupiah)				
NO	URAIAN	REF	2016	2015
1	EKUITAS AWAL	7.5.6.1	1,787,271,457,553.13	2,160,064,707,314.53
2	SURPLUS/DEFISIT-LO	7.5.6.2	212,331,964,198.84	247,021,942,324.49
3	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:	7.5.6.3	153,353,858,686.96	(619,815,192,085.89)
4	Koreksi Nilai Persediaan		(9,383,900.00)	318,773,011.00
5	Selisih Revaluasi Aset Tetap		0.00	23,253,865,361.61
6	Koreksi ekuitas lainnya		153,363,242,586.96	(643,387,830,458.50)
7	EKUITAS AKHIR	7.5.6.4	2,152,957,280,438.93	1,787,271,457,553.13
Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini.				
Pangkajene Sidenreng, 26 Mei 2017				
BUPATI				
H. RUSDI MASSE				

 PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2016 DAN 2015				
audited				
(Dalam Rupiah)				
NO	URAIAN	REF	2016	2015
1.	Saldo Anggaran Lebih Awal	7.5.2.1	28,953,661,865.43	7,063,774,659.69
2.	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	7.5.2.2	28,953,661,865.43	11,849,155,333.69
3.	Sub Total (1-2)		0.00	(4,785,380,674.00)
4.	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	7.5.2.3	8,045,376,868.35	28,953,661,865.43
5.	Sub Total (3+4)		8,045,376,868.35	24,168,281,191.43
6.	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya		0.00	4,785,380,674.00
7.	Lain-lain		0.00	0.00
8.	Saldo Anggaran Lebih Akhir (5+6+7)	7.5.2.4	8,045,376,868.35	28,953,661,865.43
Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini.				
Pangkajene Sidenreng, 26 Mei 2017				
BUPATI				
H. RUSDI MASSE				



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

NERACA KOMPARATIF

Per 31 Desember 2016 dan 2015

audited

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	Ref	2016	2015
1	ASET	7.5.3.1		
2	ASET LANCAR	7.5.3.1.a		
3	Kas di Kas Daerah	7.5.3.1.a.1) a)	2,696,533,580.35	25,545,199,269.43
4	Kas di Bendahara Pengeluaran	7.5.3.1.a.1) b)	19,139,032.00	37,296,789.00
5	Kas di Bendahara Penerimaan	7.5.3.1.a.1) c)	5,500,000.00	300,000.00
6	Kas di Bendahara Dana Kapitasi JKN	7.5.3.1.a.1) d)	636,864,135.00	824,084,416.00
7	Kas di Bendahara BLUD	7.5.3.1.a.1) e)	4,706,462,312.00	0.00
8	Kas Lainnya	7.5.3.1.a.1) f)	455,719,275.00	3,093,473,313.00
9	Piutang Pajak	7.5.3.1.a.2) a)	5,879,282,029.00	4,144,075,250.00
10	Penyisihan Piutang Pajak	7.5.3.1.a.2) b)	(1,612,454,352.18)	(801,357,829.92)
11	Piutang Pajak Netto		4,266,827,676.82	3,342,717,420.08
12	Piutang Retribusi	7.5.3.1.a.2) c)	1,112,022,972.00	950,870,498.00
13	Penyisihan Piutang Retribusi	7.5.3.1.a.2) d)	(886,341,497.50)	(518,909,680.38)
14	Piutang Retribusi Netto		225,681,474.50	431,960,817.62
15	Piutang Lainnya	7.5.3.1.a.2) e)	8,836,342,128.50	1,880,683,784.50
16	Penyisihan Piutang Lainnya	7.5.3.1.a.2) f)	(582,567,361.50)	(847,521,856.98)
17	Piutang Lain-lain Netto		8,253,774,767.00	1,033,161,927.52
18	Penyisihan Piutang		0.00	0.00
19	Persediaan	7.5.3.1.a.3)	12,606,362,170.00	9,020,860,040.00
20	JUMLAH ASET LANCAR		33,872,864,422.67	43,329,053,992.65
21	INVESTASI JANGKA PANJANG	7.5.3.1.b		
22	Investasi Jangka Panjang Non Permanen			
23	Investasi Non Permanen Lainnya	7.5.3.1.b.1)	4,656,581,370.00	4,753,361,301.00
24	JUMLAH Investasi Jangka Panjang Non Permanen		4,656,581,370.00	4,753,361,301.00
25	Penyisihan Dana Bergulir tidak dapat ditagih			
26	Penyisihan Dana Bergulir tidak dapat ditagih	7.5.3.1.b.2)	(4,656,581,370.00)	(4,753,361,301.00)
27	JUMLAH Penyisihan Dana Bergulir tidak dapat ditagih		(4,656,581,370.00)	(4,753,361,301.00)
28	Investasi Jangka Panjang Permanen			
29	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	7.5.3.1.b.3)	34,214,182,198.72	32,497,573,997.72
30	JUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen		34,214,182,198.72	32,497,573,997.72
31	JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG		34,214,182,198.72	32,497,573,997.72
32	ASET TETAP	7.5.3.1.c		
33	Tanah	7.5.3.1.c.1)	709,860,648,443.02	420,635,697,612.21
34	Peralatan dan Mesin	7.5.3.1.c.2)	242,500,541,477.96	203,126,767,819.96
35	Gedung dan Bangunan	7.5.3.1.c.3)	716,045,271,508.13	630,715,611,448.49
36	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	7.5.3.1.c.4)	1,473,423,482,887.53	1,106,994,266,602.44
37	Aset Tetap Lainnya	7.5.3.1.c.5)	32,188,675,756.26	90,301,116,612.90
38	Konstruksi Dalam Pengerjaan	7.5.3.1.c.6)	60,193,238,571.50	91,554,608,581.24
39	Akumulasi Penyusutan	7.5.3.1.c.7)	(862,375,143,014.71)	(702,438,162,255.00)
40	JUMLAH ASET TETAP		2,371,836,715,629.69	1,840,889,906,422.24
41	DANA CADANGAN			
42	Dana Cadangan	7.5.3.1.d	0.00	0.00
43	JUMLAH DANA CADANGAN		0.00	0.00
44	ASET LAINNYA	7.5.3.1.e		
45	Aset Tidak Berwujud	7.5.3.1.e.4)	794,641,000.00	260,250,000.00
46	Amortisasi Aset tak Berwujud	7.5.3.1.e.5)	(101,045,366.67)	(67,925,000.00)
47	Aset Tidak Berwujud Netto		693,595,633.33	192,325,000.00
48	Aset Lain-lain	7.5.3.1.e.6)	65,848,970,135.00	28,599,014,901.00
49	JUMLAH ASET LAINNYA		66,542,565,768.33	28,791,339,901.00
50	JUMLAH ASET (20+31+40+43+49)		2,506,466,328,019.41	1,945,507,874,313.61
51	KEWAJIBAN	7.5.3.2		
52	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	7.5.3.2.a)		
53	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	7.5.3.2.a) 1)	19,122,191.00	20,806,088.00
54	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	7.5.3.2.a) 2)	3,422,341,503.60	3,422,341,503.60
55	Pendapatan Diterima Dimuka	7.5.3.2.a) 3)	416,709,319.17	587,436,064.67
56	Utang Beban	7.5.3.2.a) 4)	72,002,080,160.70	10,476,729,046.00
57	Utang Jangka Pendek Lainnya	7.5.3.2.a) 5)	251,491,310,351.21	115,297,533,499.81
58	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		327,351,563,525.68	129,804,846,202.08
59	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	7.5.3.2.b)		
60	Utang Dalam Negeri	7.5.3.2.b) 1)	18,192,692,028.80	20,466,778,532.40
61	Utang Dalam Negeri-Non Perbankan	7.5.3.2.b) 2)	7,964,792,028.00	7,964,792,026.00
62	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	7.5.3.2.b)	26,157,484,056.80	28,431,570,558.40
63	JUMLAH KEWAJIBAN (58+62)		353,509,047,582.48	158,236,416,760.48
64	EKUITAS			
65	EKUITAS	7.5.3.2.c)	2,152,957,280,438.93	1,787,271,457,553.13
66	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS (63 + 65)		2,506,466,328,019.41	1,945,507,874,313.61

Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini.

Pangkajene Sidenreng, 26 Mei 2017

BUPATI

H. RUSDI MASSE



NERACA
PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
Per 31 December 2015 dan 2014

(Dalam Rupiah)

URAIAN	2015	2014
ASET		
ASET LANCAR		
Kas di Kas Daerah	113,890,933,454.00	0.00
Kas di Bendahara Penerimaan	(12,709,216,886.00)	0.00
Kas di Bendahara Pengeluaran	26,431,228,961.00	0.00
Kas di BLUD	0.00	0.00
Kas Lainnya	0.00	0.00
Setara Kas	0.00	0.00
Kas di Bendahara Dana Kapitasi JKN	0.00	0.00
Investasi Jangka Pendek	0.00	0.00
Piutang Pendapatan	(264,053,097,803.00)	0.00
Piutang Lainnya	0.00	0.00
Penyisihan Piutang	0.00	0.00
Beban Dibayar Dimuka	0.00	0.00
Persediaan	0.00	0.00
JUMLAH ASET LANCAR	(136,440,152,274.00)	0.00
INVESTASI JANGKA PANJANG		
Investasi Jangka Panjang Non Permanen		
Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya	0.00	0.00
Investasi dalam Obligasi	0.00	0.00
Investasi dalam Proyek Pembangunan	0.00	0.00
Dana Bergulir	0.00	0.00
Deposito Jangka Panjang	0.00	0.00
Investasi Non Permanen Lainnya	0.00	0.00
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Non Permanen	0.00	0.00
Investasi Jangka Panjang Permanen		
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0.00	0.00
Investasi Permanen Lainnya	0.00	0.00
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen	0.00	0.00
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	0.00	0.00
ASET TETAP		
Tanah	0.00	0.00
Peralatan dan Mesin	166,752,000.00	0.00
Gedung dan Bangunan	95,437,500.00	0.00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	41,108,608,962.00	0.00
Aset Tetap Lainnya	0.00	0.00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	727,434,950.00	0.00
Akumulasi Penyusutan	0.00	0.00
JUMLAH ASET TETAP	42,098,233,412.00	0.00
DANA CADANGAN		
Dana Cadangan	0.00	0.00
JUMLAH DANA CADANGAN	0.00	0.00
ASET LAINNYA		
Tagihan Jangka Panjang	0.00	0.00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0.00	0.00
Aset Tidak Berwujud	0.00	0.00
Aset Lain-lain	0.00	0.00
JUMLAH ASET LAINNYA	0.00	0.00
JUMLAH ASET	(94,341,918,862.00)	0.00
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	13,041,446,362.00	0.00
Utang Bunga	0.00	0.00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0.00	0.00
Pendapatan Diterima Dimuka	0.00	0.00
Utang Beban	(143,088,627,876.00)	0.00
Utang Jangka Pendek Lainnya	(51,951,851,431.00)	0.00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	(181,999,032,945.00)	0.00
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
Utang Dalam Negeri	0.00	0.00
Utang Jangka Panjang Lainnya	0.00	0.00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0.00	0.00
JUMLAH KEWAJIBAN	(181,999,032,945.00)	0.00
EKUITAS		
EKUITAS	0.00	0.00
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	(181,999,032,945.00)	0.00

RIWAYAT HIDUP



Jumariah, dilahirkan di kel.leppangeng kec. Pitu Riase Kab. Bonepada tanggal 1 Mei 1996. Anak ke terakhir dari ke Enam bersaudara dan merupakan buah hati pasangan Kuhu dan Hia. Penulis memulai jenjang pendidikan sekolah dasar pada tahun 2002 sampai 2008 di SD 12 Batu, Pitu Riase. Pada tahun sama penulis melanjutkan pendidikan ke

jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Negeri 3 Pangsid Sidrap, tamat pada tahun 2011. Pada tahun 2011 penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA Negeri 1 Wattang Pulu Sidrap sampai tamat pada tahun 2014. Kemudian pada tahun yang sama, penulis diterima pada Jurusan Akuntansi Strata Satu (S1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.